



PEMERINTAH  
PROVINSI BALI

INDONESIA MAJU

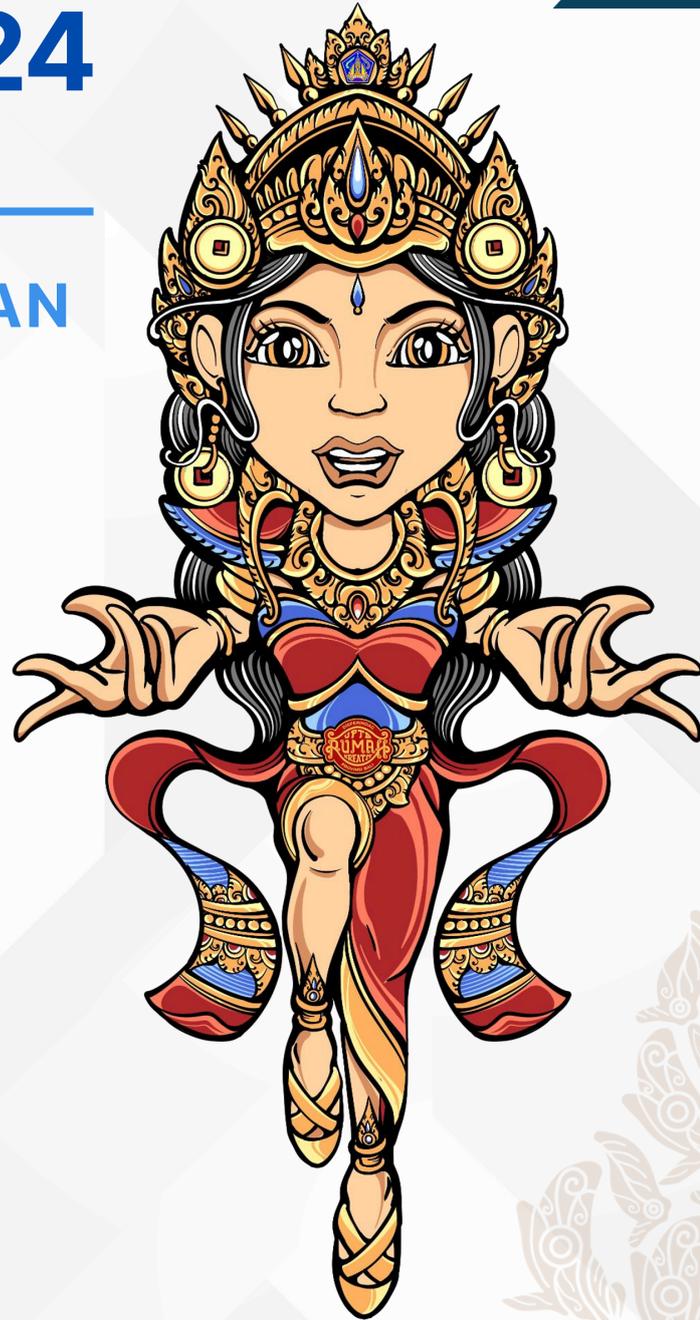
BerAKHLAK  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# bangga  
melayani  
bangsa

# LKjIP TAHUN 2024

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN



-  [disperindag.baliprov.go.id](http://disperindag.baliprov.go.id)
-  @disperindag\_bali
-  [disperindag@baliprov.go.id](mailto:disperindag@baliprov.go.id)
-  Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jабaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dan dijabarkan dalam Renstra. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Diharapkan penyajian LKJiP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dimasa mendatang.

Denpasar, 21 Februari 2024

Pt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI  
BALI



**Ir. I Made Sudarsana, M.Si**

NIP. 196508100199203 1 017

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. **Sasaran 1** : Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB, dengan indikator kinerja: Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan target 9% dengan realisasi 8,69%
- b. **Sasaran 2** : Meningkatnya sektor Perindustrian terhadap PDRB dengan indikator kinerja: Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB target sebesar 6,04% realisasi sebesar 6,24%,
- c. **Sasaran 3** : Meningkatnya daya saing ekonomi lokal dengan indikator kinerja: Persentase Produk yang terserap pasar target sebesar 30% dengan realisasi 30%.

Selain pencapaian sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali juga ditunjukkan oleh pencapaian target Pelaksanaan Program Pendukung.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali ke depan **Pertama**, tantangan yang dihadapi dalam Menguatnya Perdagangan Dalam Negeri antara lain masih berfluktuasi nya harga kebutuhan pokok, masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak *konsumen*. **Kedua**, tantangan yang dihadapi dalam Meningkatnya Daya Saing Industri antara lain perlunya inovasi yang tinggi agar produk yang dikembangkan dapat bersaing, peningkatan kualitas SDM dalam teknik produksi, meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam produksi dan pemasaran, memiliki merek (HKI), dan melakukan peningkatan mutu produk secara berkelanjutan agar mampu bersaing dengan produk impor. **Ketiga**, tantangan yang dihadapi dalam Meningkatnya daya saing ekonomi lokal antara lain Kurangnya pemasaran produk lokal menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang masih mengalami kesulitan dalam memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi dan platform digital, minimnya pemahaman tentang strategi pemasaran yang efektif, serta kurangnya dukungan dalam hal promosi dan branding.

Selain itu, banyak produk lokal yang memiliki kualitas baik tetapi belum dikenal secara luas karena rendahnya eksposur di media sosial dan e-commerce. Persaingan dengan produk-produk dari luar daerah maupun impor juga semakin ketat, sehingga produk lokal sering kali kalah dalam hal daya tarik dan pemasaran.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum .....	3
1.4 Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.....	4
1.5 Peta Proses Bisnis .....	6
1.6 Aspek Strategis serta Permasalahan utama dan Isu Strategis .....	9
1.7 Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Prasarana Berdasarkan Jenis Aset.....	9
1.8 Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024 .....	9
1.9 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023.....	9
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Strategi dan Kebijakan .....	16
2.2 Rencana Kinerja Tahun Berjalan.....	20
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun Bersangkutan .....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>25</b>
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	26
3.2 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024.....	28

3.3 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir .....	56
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	58
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan .....	59
3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	60
3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan .....	61
3.8 Aspek Keuangan .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1.1 Rincian Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024 .....	13
Tabel 1.2 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023 .....	13
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran .....	19
Tabel 2.2 Tabel Rencana Kinerja Bersangkutan .....	21
Tabel 2.3 Program Jangka Menengah Perubahan RPJMD (Tabel 7.2B) .....	21
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	23
Tabel 2.5 Anggaran yang mendukung kinerja pada tahun 2024 (APBD) .....	23
Tabel 2.6 Anggaran yang mendukung kinerja pada tahun 2024 (APBN) .....	24
Tabel 3.1 Kriteria Nilai .....	25
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 Sasaran 1 .....	26
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 Sasaran 2 .....	27
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 Sasaran 3 .....	27
Tabel 3.5 PERKEMBANGAN HARGA KEBUTUHAN BAHAN POKOK TAHUN 2024 .....	33
Tabel 3.6 Data Pasar Tradisional dan Pasar Modern Provinsi Bali Tahun 2024.....	35
Tabel 3.7 Data Distributor, Sub Distributor dan Agen Provinsi Bali.....	35
Tabel 3.8 JUMLAH EKSPORTIR BALI 2024 .....	41
Tabel 3.9 Pelaku Usaha yang difasilitasi Pameran Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali .....	41
Tabel 3.10 REKAP PENDAMPINGAN DAN FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL UPTD. RUMAH KREATIF DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI 2023 dan 2024 .....	53

Tabel 3.11 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir .....	57
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.....	58
Tabel 3.13 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan .....	59
Tabel 3.14 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	61
Tabel 3.15 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan .....	61
Tabel 3.16 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	65
Tabel 3.17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Cascading Disperindag .....	5
Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali .....	7
Gambar 1.3 Profil Demografi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan ..	11
Gambar 1.4 Profil Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan .....	12
Gambar 3.1 ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 SASARAN 1 .....	29
Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Menurut Lapangan Usaha.....	30
Gambar 3.3 PERKEMBANGAN INFLASI PROVINSI BALI .....	32
Gambar 3.4 Perkembangan Ekspor Provinsi Bali Dari Tahun 2020 – 2024.....	39
Gambar 3.5 ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 SASARAN 2 .....	43
Gambar 3.6 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Menurut Lapangan Usaha.....	45
Gambar 3.7 Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Bali pada Tahun 2020 – 2024 .....	43
Gambar 3.8 Perkembangan Jumlah Tenaga kerja Sektor Industri Bali pada Tahun 2018 – 2024 .....	45
Gambar 3.9 Fasilitasi Desain UPTD – Rumah Kreatif pada Tahun 2023 – 2024 .....	52
Gambar 3.9 Gambar 3.8 Perkembangan Jumlah Tenaga kerja Sektor Industri Bali pada Tahun 2018 – 2024 .....	55



# BAB I

## PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Maksud dan Tujuan

1.3

Landasan Hukum

1.4

Cascading Kinerja Sebagai  
Dasar Pembentukan  
Organisasi Perangkat Daerah

1.5

Peta Proses Bisnis

1.6

Aspek Strategis serta  
Permasalahan utama dan  
Isu Strategis

1.7

Sumber Daya Manusia  
(SDM) serta Sarana dan  
Prasarana Berdasarkan  
Jenis Aset

1.8

Anggaran Dinas  
Perindustrian dan  
Perdagangan Provinsi Bali  
Tahun 2024

1.9

Tindak Lanjut atas  
Laporan Hasil Evaluasi  
SAKIP 2023





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
2. Mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali untuk meningkatkan kinerjanya.



## 1.2 Maksud dan Tujuan

### A. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024 bertujuan untuk menginformasikan capaian kinerja atas indikator sasaran yang telah ditetapkan sepanjang tahun anggaran 2024.

### B. Tujuan

Tujuan utama dari penyusunan LKjIP ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali pada tahun 2024. LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam mengevaluasi permasalahan yang ada, serta sebagai acuan dalam merumuskan program-program di tahun berikutnya. Dengan demikian, program-program di tahun mendatang dapat disusun dengan lebih terfokus, efektif, efisien, terukur, dan tetap mengutamakan transparansi serta akuntabilitas. Selain itu, LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Mendorong pelaksanaan pembangunan sektor industri dan perdagangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- b) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan umpan balik dari seluruh *stakeholders*, guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, responsif, dan berkualitas;
- c) Memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif, efisien, serta responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

### 1.3 Landasan Hukum

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
9. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

#### **1.4 Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah**

Cascading adalah proses penurunan atau penerjemahan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dari tingkat organisasi yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah, seperti unit kerja atau individu, sehingga setiap bagian dalam organisasi dapat berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian tujuan utama organisasi.

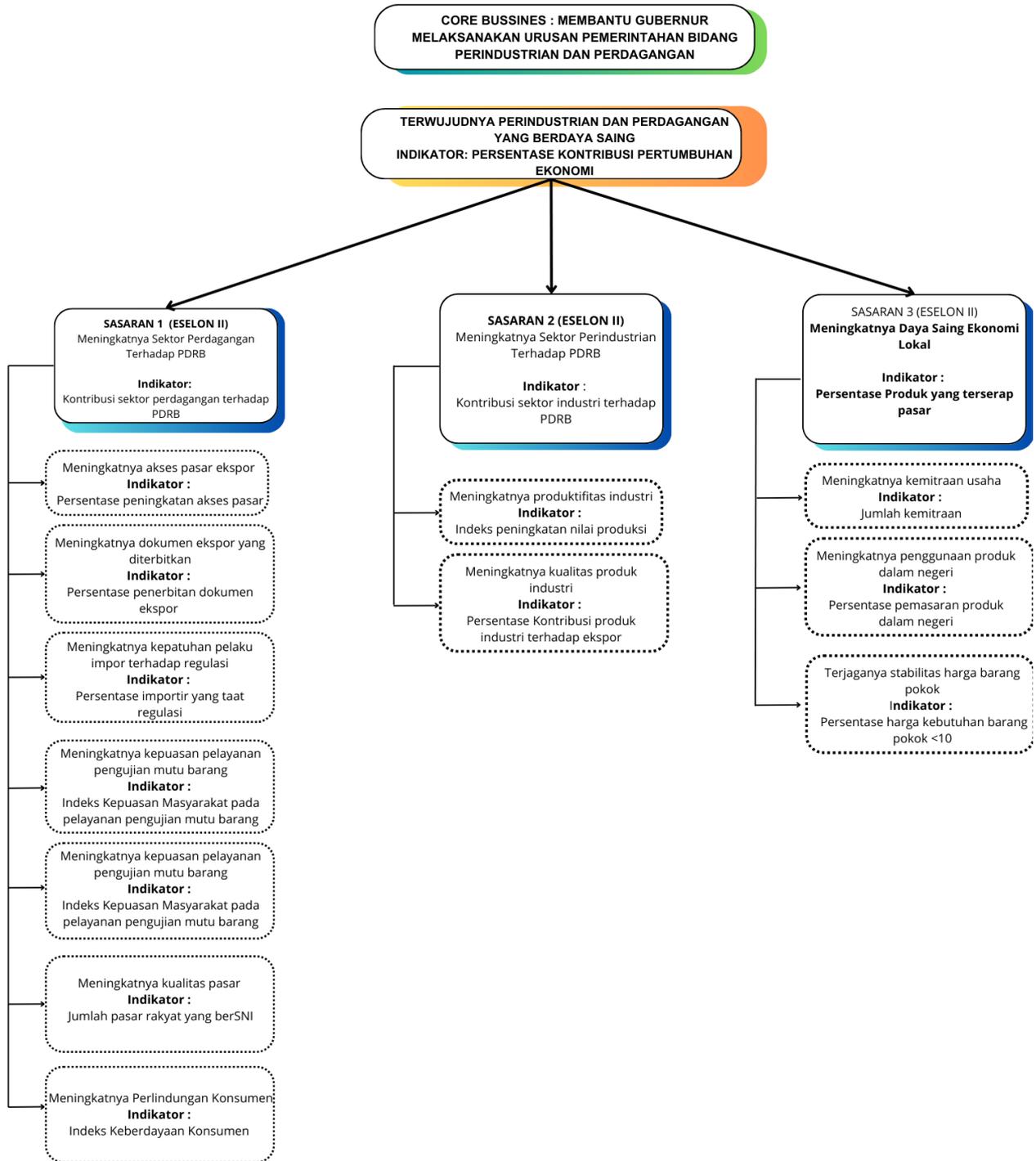
Dalam konteks organisasi berbasis kinerja, cascading sering digunakan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi (misalnya pemerintah daerah) dapat diterjemahkan dengan jelas ke dalam aktivitas yang lebih operasional dan dapat diukur di tingkat unit kerja atau individu. Proses ini bertujuan untuk menyelaraskan seluruh elemen organisasi agar bekerja menuju pencapaian hasil yang diinginkan.

Sesuai dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja yang telah di terapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali, yang mana setiap Perangkat Daerah dibentuk agar memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah berdasarkan



Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

**Gambar 1.1  
CASCADING DISPERINDAG**





## 1.5 PETA PROSES BISNIS

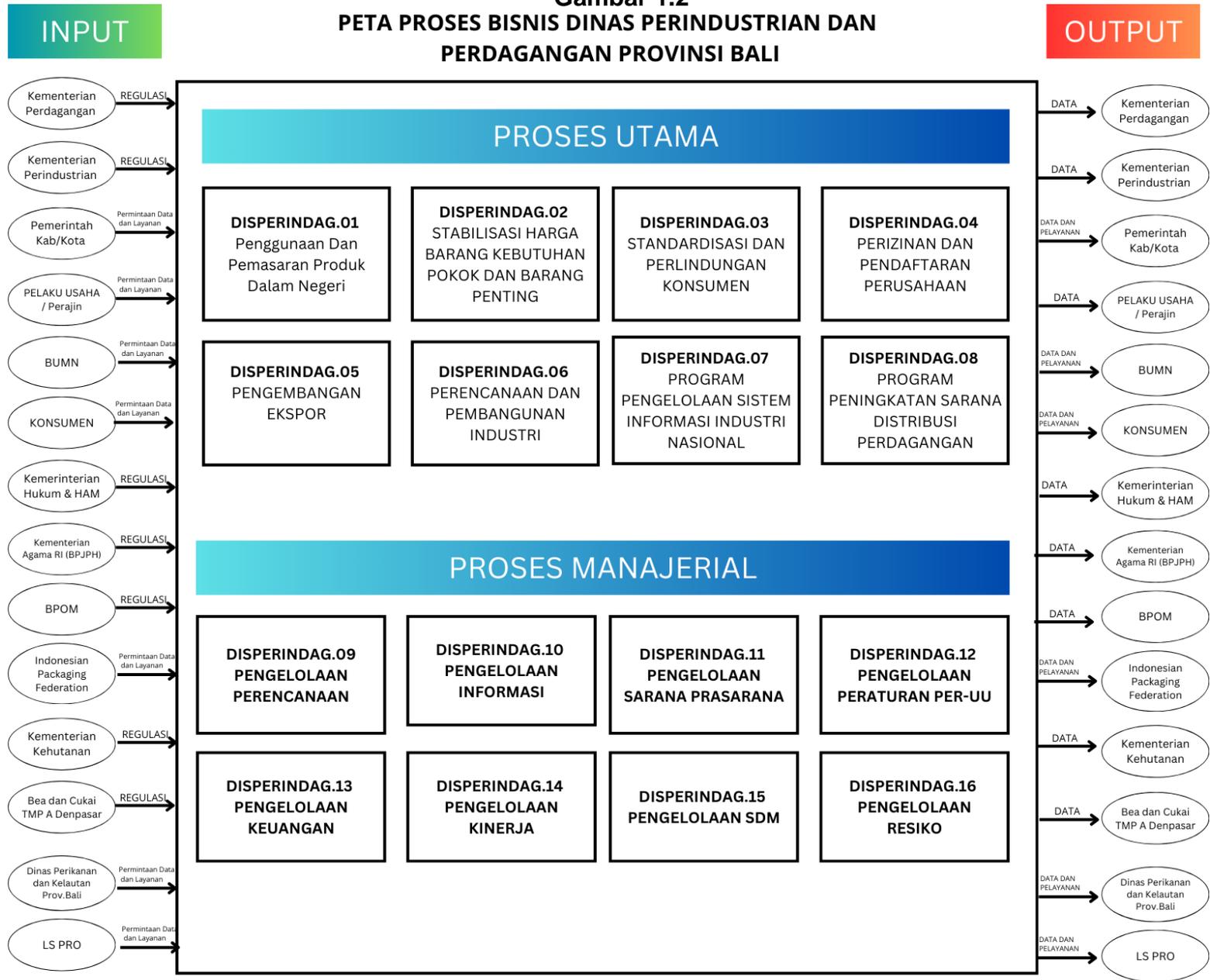
Peta Proses Bisnis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis alur kerja, tahapan, serta interaksi antar unit atau bagian di dalam organisasi. Peta ini memetakan langkah-langkah yang terlibat dalam setiap proses bisnis yang ada di Disperindag, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan dan program. Dengan peta proses bisnis, Disperindag Provinsi Bali dapat mengidentifikasi alur kerja yang lebih efisien, mengurangi potensi hambatan, serta memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Melalui peta proses bisnis ini, Disperindag dapat memahami dengan jelas bagaimana tugas dan tanggung jawab setiap unit kerja terhubung satu sama lain, sehingga mempermudah koordinasi dan kolaborasi antar bagian. Selain itu, peta ini juga berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan bahwa semua proses yang dilakukan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan industri dan perdagangan di Provinsi Bali.

Dengan adanya peta proses bisnis yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, Disperindag Provinsi Bali dapat lebih mudah dalam mengidentifikasi peluang perbaikan, merumuskan kebijakan yang tepat, serta memonitor kinerja organisasi secara lebih efektif. Secara umum peta proses bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali di gambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1.2**  
**PETA PROSES BISNIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN**  
**PERDAGANGAN PROVINSI BALI**



**C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali merupakan unsur



pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
  - Sekretaris
  - Subag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perindustrian
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
- e. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
- f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Susunan Organisasi UPT di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut ini :

- a. UPT Rumah Kreatif
  - Sub Bagian Tata Usaha
  - Kepala Seksi Industri Digital
  - Kepala Seksi Desain Produk dan Kemasan
- b. UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
  - Sub Bagian Tata Usaha
  - Kepala Seksi Mutu Pelayanan Laboratorium

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai tugas pokok : Melaksanakan urusan pemerintah bidang



Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

### **1.6 Aspek Strategis serta Permasalahan utama dan Isu Strategis**

Agar pengembangan dan pembinaan sektor industri dan perdagangan menjadi lebih efektif dan efisien diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek strategis yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan dan pembinaan tersebut. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara



optimal. Permasalahan pembangunan pada bidang ekonomi yang meliputi perindustrian dan perdagangan sebagai berikut:

**a. Perdagangan**

- 1) Akses pasar dan jaringan pemasaran lemah;
- 2) Infrastruktur perdagangan masih kurang mendukung;
- 3) Kesadaran Pelaku Usaha dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;
- 4) Terbatasnya kemampuan pelaku usaha yang berorientasi ekspor;
- 5) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri;
- 6) Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik.

**b. Perindustrian**

- 1) Daya saing produk Industri Bali masih lemah;
- 2) Keterbatasan bahan baku industri produk lokal maupun ekspor yang tersedia;
- 3) Sistem pengembangan Industri belum komprehensif dan berkelanjutan;
- 4) Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI);
- 5) Kemampuan informasi teknologi industri masih lemah.

Dalam penjabarannya sesuai dengan tugas pengembangan sektor industri dan perdagangan, maka dilakukan analisis Isu-Isu Strategis yang dapat digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan program kegiatan di sektor Industri dan Perdagangan dari tahun 2024 – 2026.

Adapun isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali antara lain:

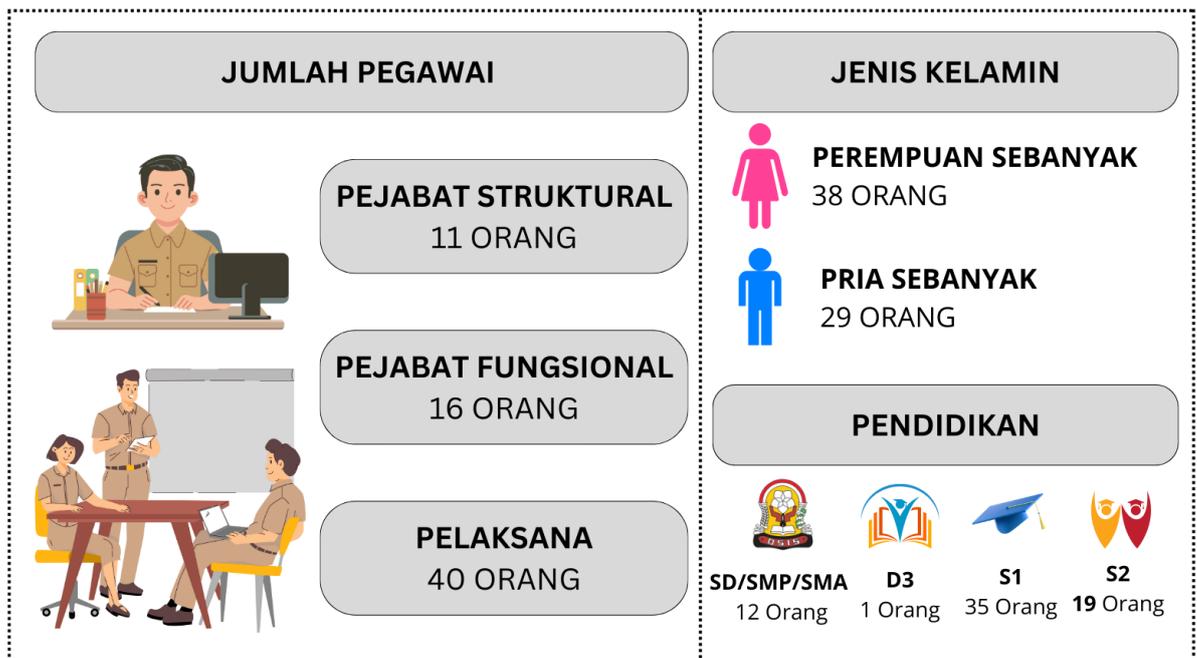


1. Masih lemahnya daya saing produk industri
2. Masih rendahnya pemasaran produk lokal
3. Masih berfluktuasinya harga kebutuhan barang pokok
4. Belum optimalnya pertumbuhan ekspor non migas di Provinsi Bali
5. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pentingnya hak konsumen
6. Belum optimalnya pelayanan pengujian dan sertifikasi produk komoditi unggulan orientasi ekspor

### 1.7 Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Prasarana Berdasarkan Jenis Aset

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali memiliki sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana kerja. Gambaran umum potensi sumber daya manusia dapat digambarkan berdasarkan komposisi pembagian berdasarkan kelengkapan eselonisasi, komposisi berdasarkan kriteria tertentu seperti pendidikan, jenis kelamin adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.3 Profil Demografi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan**





Selain itu untuk memperlancar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali memiliki sarana dan Prasarana sebagai berikut :

**Gambar 1.4 Profil Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan**



### 1.8 Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali pada Tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp.21.312.702.146,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp.21.151.848.746,- atau 99,24% dan belanja modal sebesar Rp.160.853.400,- atau 0,76%. Berikut ini merupakan rincian anggaran tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan :



**Tabel 1.1. Rincian Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024**

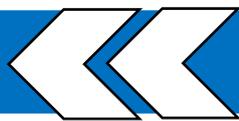
Uraian	Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
Belanja Operasi	21.151.848.746	99,24%
Belanja Modal	160.853.400	0,76%
<b>Total</b>	<b>21.312.702.146</b>	<b>100%</b>

### 1.9 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023

Berikut ini merupakan tindaklanjut saran / rekomendasi berdasarkan Surat Inspektorat Provinsi Bali B.09/700/4299/IR.IV/ITPROV 1 Juli2024 tentang LHE SAKIP pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali atas SAKIP Tahun 2023:

**Tabel 1.2  
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Tindaklanjut
a.	Melakukan reuiu untuk memastikan indikator kinerja yang berkualitas, yaitu memenuhi kriteria SMART ( <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound</i> ) terutama pada kriteria spesifik dan relevan	<ul style="list-style-type: none"><li>Merevui kembali indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART terutama pada kriteria spesifik dan relevan</li><li>Surat Pernyataan Kepala Dinas untuk selanjutnya merevui kembali indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART terutama pada kriteria spesifik dan relevan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Telah dilakukan review terhadap indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART terutama pada kriteria spesifik dan relevan</li><li>Telah dibuat Surat Pernyataan Kepala Dinas untuk selanjutnya merevui kembali indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART terutama pada kriteria spesifik dan relevan</li></ul>
b.	Memastikan rumusan untuk sasaran strategis agar lebih berorientasi <i>outcome</i> dan indikator	<ul style="list-style-type: none"><li>Memastikan rumusan untuk sasaran strategis agar lebih</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Telah dilakukan review terhadap rumusan untuk sasaran</li></ul>



No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Tindaklanjut
	kinerja yang SMART, yang merupakan indicator yang digunakan untuk pengukuran sasaran yang riil	<p>berorientasi <i>outcome</i> dan indikator kinerja yang SMART, yang merupakan indicator yang digunakan untuk pengukuran sasaran yang riil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pernyataan Kepala Dinas untuk selanjutnya Memastikan kembali rumusan untuk sasaran strategis agar lebih berorientasi <i>outcome</i> dan indikator kinerja yang SMART, yang merupakan indicator yang digunakan untuk pengukuran sasaran yang riil</li> </ul>	<p>strategis agar lebih berorientasi <i>outcome</i> dan indikator kinerja yang SMART, yang merupakan indicator yang digunakan untuk pengukuran sasaran yang riil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah Dibuat Surat Pernyataan Kepala Dinas untuk selanjutnya Memastikan kembali rumusan untuk sasaran strategis agar lebih berorientasi <i>outcome</i> dan indikator kinerja yang SMART, yang merupakan indicator yang digunakan untuk pengukuran sasaran yang riil</li> </ul>
c.	Membangun pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik/digital dan mendorong pelaksanaan pemantauan pencapaian kerjanya secara berkala, yaitu minimal per triwulanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pengukuran dan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi</li> <li>• Surat Pernyataan Kepala Dinas untuk selanjutnya dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja memanfaatkan teknologi informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti SIDALEV</li> <li>• Telah dibuatkan Surat Pernyataan Kepala Dinas untuk selanjutnya dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja memanfaatkan teknologi informasi</li> </ul>
d.	a. Memastikan penyusunan laporan kinerja dapat memberikan informasi terkait dengan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja sehingga dapat digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan penyusunan laporan kinerja selanjutnya memuat informasi terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilakukan review penyusunan laporan kinerja selanjutnya memuat informasi terkait</li> </ul>



No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Tindaklanjut
	sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya	dengan efisiensi atas penggunaan sumber daya <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan Kepala Dinas untuk selanjutnya dalam penyusunan laporan kinerja memuat informasi terkait dengan efisiensi atas penggunaan sumber daya</li></ul>	dengan efisiensi atas penggunaan sumber daya <ul style="list-style-type: none"><li>• Telah dibuatkan Surat Pernyataan Kepala Dinas untuk selanjutnya dalam penyusunan laporan kinerja memuat informasi terkait dengan efisiensi atas penggunaan sumber daya</li></ul>
e.	Mendorong terbentuknya tim implementasi AKIP internal yang melakukan reuiu data laporan kinerja secara berjenjang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membentuk tim reuiu AKIP internal</li><li>• SK Tim reuiu AKIP internal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah Dibentuk Tim Reuiu AKIP Internal</li><li>• Surat Keputusan Nomor : 32 Tahun 2025 32 Tahun 2025 Tentang Tim Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) Di Lingkungan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali</li></ul>



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

2.1 Strategi dan Kebijakan

2.2 Rencana Kinerja Tahun Berjalan

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun Bersangkutan





## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Strategi dan Kebijakan

#### a. Strategi

Sejalan dengan upaya mewujudkan perindustrian dan perdagangan bali yang berdaya saing, maka strategi pengembangan industri dan perdagangan, diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Memprioritaskan pembinaan Industri yang berorientasi ekspor, berdasarkan kompetensi inti daerahnya masing-masing. Peningkatan keterampilan para pengrajin melalui pelatihan dan magang. Selain itu pula menggunakan sistem kluster dan fokus pada satu desa satu produk (OVOP).
2. Mengkordinasikan tersedianya bahan baku industri kerajinan. Memfasilitasi adanya kerjasama dengan daerah lain sebagai penghasil bahan baku yang dibutuhkan oleh para pengrajin.
3. Memfasilitasi pemasyarakatan teknologi industri, menyarankan agar para pengusaha/pengrajin mau dan dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG) sehingga terwujud efisiensi produksi.
4. Mengupayakan bantuan tenaga ahli teknik dan desain untuk diversifikasi produk. Memfasilitasi agar para pengrajin mendapat bantuan tenaga yang ahli dibidang teknik dan desain produk kerajinan, sehingga mampu menghasilkan inovasi produk dengan desain yang memenuhi selera pasar dan dapat bersaing dipasar global.
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), melakukan sosialisasi dan bimbingan melalui pembentukan klinik HKI.



6. Melakukan fasilitasi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kelompok industri kreatif, meliputi 15 sub sektor yaitu periklanan, arsitektur, animasi, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan/percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi & radio, riset dan pengembangan.
7. Memfasilitasi peningkatan promosi maupun pemasaran. Mengupayakan agar para produsen/pedagang dapat mempromosikan sekaligus menjual produknya di beberapa daerah di Indonesia, serta di beberapa negara lain yang dipandang potensial sebagai pangsa pasar ekspor. Selain itu sebaiknya Provinsi Bali mempunyai fasilitas tempat pameran bertaraf internasional sehingga para pengusaha dapat melakukan pameran/promosi di Bali dan tidak harus berpameran di daerah lain atau negara lain. Bahkan daerah lainpun dapat berpameran di Bali , hal ini disebabkan nama Bali yang sudah terkenal di tingkat nasional dan internasional, dimana Bali dapat menjadi *market point*. Dengan terbangunnya pameran bertaraf internasional pameran/promosi dapat ditingkatkan jumlah pesertanya maupun intensitas pelaksanaannya dengan biaya yang lebih ringan, dapat pula pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk memenuhi selera pasar juga dapat direncanakan untuk membangun sebuah design centre sebagai tempat pengembangan design yang mengikuti selera pasar.
8. Memfasilitasi Peningkatan efektifitas dan efisiensi perdagangan. Mengupayakan peningkatan perlindungan konsumen, dan memperkuat sistem pengawasan barang dan jasa. Pelaksanaannya dilakukan melalui program perkuatan sistem dan pelaksanaan pengawasan barang beredar terutama barang-barang yang menyangkut aspek keselamatan, kesehatan,

keamanan, lingkungan (K3L), tertib usaha, dan tertib ukur. Optimalisasi peran laboratorium pengujian dan sertifikasi mutu barang. Mengupayakan adanya integritas pasar yang baik, tertib, teratur, dipercaya dan pembentukan harga yang transparan merupakan salah satu cerminan terhadap tingkat efektivitas mekanisme pasar. Lancarnya distribusi barang, tersedianya stock secara berkesinambungan serta tidak adanya beban distribusi yang tidak resmi dan berlebihan merupakan wujud dari mekanisme perdagangan yang efisien.

9. Memfasilitasi pengembangan ekspor. Selain komoditi kerajinan yang sangat potensial sebagai komoditi ekspor, di Bali juga diupayakan pengembangan komoditi agro, mengingat pangsa pasar yang cukup banyak, lahan pertanian untuk agro bisnis cukup luas dan cukup subur.
10. Melakukan pembinaan kepada para eksportir maupun calon eksportir dalam rangka peningkatan SDM.
11. Mengupayakan peningkatan pelayanan informasi.
12. Menyediakan dan memberikan berbagai informasi mengenai kebijakan maupun teknis pelaksanaan berkenaan dengan sektor industri dan perdagangan, bagi masyarakat, lembaga/ instansi yang membutuhkan.
13. Melakukan sosialisasi peraturan-peraturan kepada pelaku usaha baik importir maupun eksportir.
14. Peningkatan peran kelembagaan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada eksportir dan importir.
15. Pembinaan untuk peningkatan daya saing produk unggulan daerah.
16. Peningkatan akses pasar ke negara-negara target ekspor melalui promosi.
17. Melakukan pengembangan pasar dengan pengamatan terhadap pasar potensial, segmen pasar, pemasok dan pesaing.



18. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dengan *Stakeholders* dalam rangka masukan untuk kerjasama perdagangan internasional.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran**

Tujuan	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan yang Berdaya Saing	Menguatnya Perdagangan Dalam Negeri	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9%	9%	9%	9%	9%
	Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%
	Meningkatnya Daya saing Ekonomi Lokal	Persentase Produk yang terserap Pasar	30%	30%	30%	30%	30%

**b. Kebijakan**

Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan untuk mencapai keberhasilan perlu ditetapkan kebijakan yang ditempuh melalui sasaran yang satu dengan yang lainnya saling terkait guna menentukan kebijakan.

Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali adalah :

1. Mengembangkan industri berdaya saing tinggi yang berbasis kompetensi inti daerah melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain dan akses pasar serta peningkatan sumber daya manusia, dengan memanfaatkan kemampuan teknologi.
2. Mengembangkan industri hijau yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mendukung menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau.
3. Mengembangkan Sistem Informasi Industri yang terintegrasi meliputi unsur Institusi, Sumber Daya Manusia, Basis Data, Perangkat Keras dan Lunak,

serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengolahan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan informasi industri.

4. Menetapkan target ekspor daerah, mendorong peningkatan kualitas produk ekspor yang bernilai tambah tinggi, meningkatkan kemudahan fasilitasi pelayanan publik, memanfaatkan hasil kerjasama perdagangan internasional, mendorong para pengusaha untuk menjadi eksportir dan meningkatkan partisipasi pengusaha Bali dalam jaringan global dan promosi.
5. Menjaga ketersediaan dan distribusi serta stabilitas harga kebutuhan barang pokok dan barang penting.
6. Meningkatkan sosialisasi untuk membentuk konsumen cerdas dan melakukan pengawasan perlindungan konsumen.

## **2.2 Rencana Kinerja Tahun Berjalan**

Untuk memenuhi target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, Disperindag Provinsi Bali menetapkan Rencana Kinerja Tahun Berjalan untuk dapat mengukur kinerja selama setahun yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Disperindag Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026. Rencana Kinerja Tahun Bersangkutan adalah kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023, memuat informasi tentang : (1) Tujuan (2) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (3) Indikator kinerja sasaran ; (4) Satuan; (5) target capaian.

Sasaran atas kinerja setahun merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur

berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya. Sasaran yang akan dicapai Disperindag Provinsi Bali pada tahun 2024.

Target dari masing-masing indikator dicapai dan diukur dari hasil pelaksanaan program/kegiatan pada Disperindag Provinsi Bali, dengan demikian secara langsung maupun tidak langsung sasaran dalam RPD akan dicapai melalui sasaran dan indikator dalam Renstra Perangkat Daerah, dengan kata lain tercapainya target dalam IKU Perangkat Daerah akan mampu mendukung pencapaian sasaran dalam RPJMD

**Tabel 2.2**  
**Tabel Rencana Kinerja Bersangkutan**

Tujuan	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Target
<b>Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan yang Berdaya Saing</b>	Menguatnya Perdagangan Dalam Negeri	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase	9%
	Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persentase	6,04%
	Meningkatnya Daya saing Ekonomi Lokal	Persentase Produk yang terserap Pasar	Persentase	30%

**Tabel 2.3**  
**Program Jangka Menengah Perubahan RPJMD dan Rencana Pembangunan Daerah (Tabel 7.2B)**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali**

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Realisasi (RPJMD 2018-2023)				Target RPD 2024
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN</b>						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,08	83,08	83,24	83,41	82,40
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.85 %	82,07%	84%	85,14%	82%
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar ber SNI	4	4	5	5	1
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga barang Pokok	4,10%	3,20%	4,72%	3,32	7



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Realisasi (RPJMD 2018-2023)				Target RPD 2024
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	64,95%	59,44%	60,99%	59,79	55%
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	48,32	49,68	52,35	56,05	49,70
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	25%	30%	<b>30%</b>	30%	30%
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN</b>						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,08	83,08	83,24	83,41	82,40
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1,5%	1,50%	<b>1,62%</b>	36,01	1,50%
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Ketersediaan Data Industri	100%	100%	100%	100%	100%

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun Bersangkutan

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang dibiayai melalui dana : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali : DPPA/A.3/3.31.3.30.0.00.02.0000/001/2024, tanggal 2 Januari 2024, adapun perjanjian kinerja berdasarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan



kegiatan utama (yang menunjukkan *core bussines* SKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Menguatnya Perdagangan Dalam Negeri	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9%
Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	6,04%
Meningkatnya Daya saing Ekonomi Lokal	Persentase Produk yang terserap Pasar	30%

Untuk mendukung pelaksanaan program prioritas dan pendukung dapat dijabarkan anggaran yang mendukung kinerja pada tahun 2024 seperti tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Anggaran yang mendukung kinerja pada tahun 2024 (APBD)**

PROGRAM PRIORITAS		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	111.426.100	APBD
2	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	272.598.080	APBD
3	Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	49.213.800	APBD
4	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	322.387.120	APBD
5	Program pengembangan Ekspor	49.991.600	APBD
6	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	843.582.440	APBD
7	Program perencanaan dan pembangunan industri	1.414.763.260	APBD
8	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	17.869.389.920	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>20.933.352.320</b>	



**Tabel 2.6**  
**Anggaran yang mendukung kinerja pada tahun 2024 (APBN)**

PROGRAM APBN		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Perdagangan Luar Negeri	208.105.000	APBN
2	Program Perdagangan Dalam Negeri	266.153.000	APBN
3	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.281.248.000	APBN
<b>Total</b>		<b>1.755.506.000</b>	



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

3.1

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

3.2

Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024

3.3

Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir

3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

3.5

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

3.6

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan

3.8

Aspek Keuangan





## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali tahun 2024 yang telah disepakati. Untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja, dilakukan pengumpulan data kinerja yang hasilnya dapat memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

**TABEL 3.1**  
**KRITERIA NILAI**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Nilai Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian



dan Perdagangan Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

### 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai tiga sasaran utama dalam meningkatkan kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi dari perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian. Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali merupakan proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka panjang yang sifatnya menyeluruh serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja perangkat daerah. Adapun tiga sasaran yang dimaksud antara lain :

TABEL 3.2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024 SASARAN 1

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9%	8,97%	99,55%	9%	8,69 %	96,55%

Pada sasaran 1 Meningkatkan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ditetapkan satu indikator kinerja yaitu :

- Pada tahun 2024 indikator Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Provinsi Bali tercapai sebesar 8,69% dari target 9%



realisasi ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 8,97 %

TABEL 3.3

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024 SASARAN 2

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>MENINGKATNYA DAYA SAING INDUSTRI</b>	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	6,04%	6,23%	103,31%	6,04%	6,24%	103,33%

Indikator kinerja MENINGKATNYA DAYA SAING INDUSTRI ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tahun 2024 Realisasi Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 6,24% sehingga capaian kinerjanya sebesar 103,31% dari target yang telah ditentukan sebesar 6,04%.

TABEL 3.4

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023 SASARAN 3

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya daya saing ekonomi lokal	Persentase Produk yang terserap pasar	30%	30%	100%	30%	30%	100%



Indikator kinerja sasaran Meningkatnya daya saing ekonomi lokal ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2024 Persentase Produk yang terserap pasar sebesar 30% dari target yang ditetapkan sebesar 30% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

### **3.2 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024**

#### **3.2.1 Sasaran Strategis Satu**

##### ***Sasaran Strategis 1***

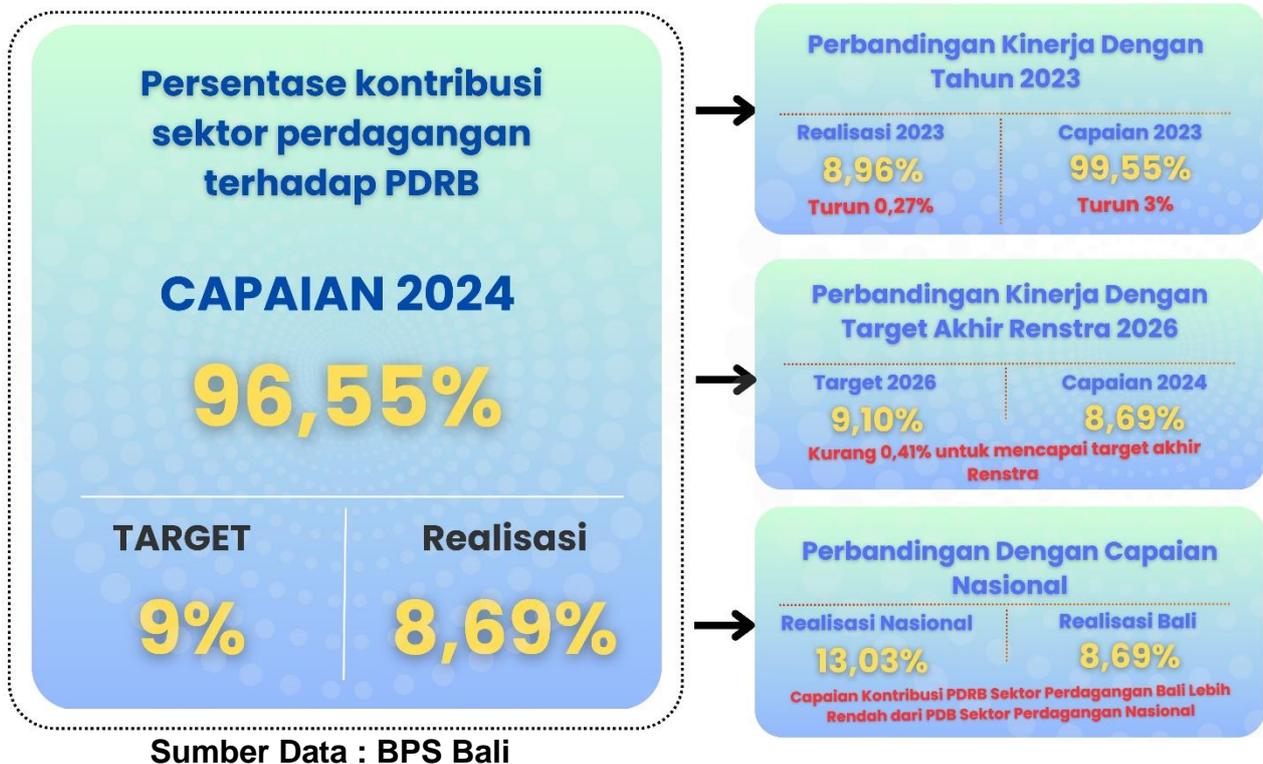
##### ***Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB***

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperlukan suatu pendekatan yang lebih realistis. Akan tetapi selama ini tetap mengacu pada model perhitungan secara nasional, yakni Produk Domestik Bruto (PDB) yang mana dalam perhitungan riilnya yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Peranan sektor perdagangan, pertumbuhan ekonomi maka diperlukan angka proyeksi pertumbuhan peranan sektor perdagangan, dalam pertumbuhan ekonomi maka diperlukan angka proyeksi pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, hotel dan restoran. Angka proyeksi pertumbuhan ekonomi sektor ini akan mendukung keakuratan proyeksi pertumbuhan ekonomi secara agregat. Berdasarkan hal-hal

tersebut, realisasi PDRB sektor perdagangan di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel berikut :

Gambar 3.1

## ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 SASARAN 1



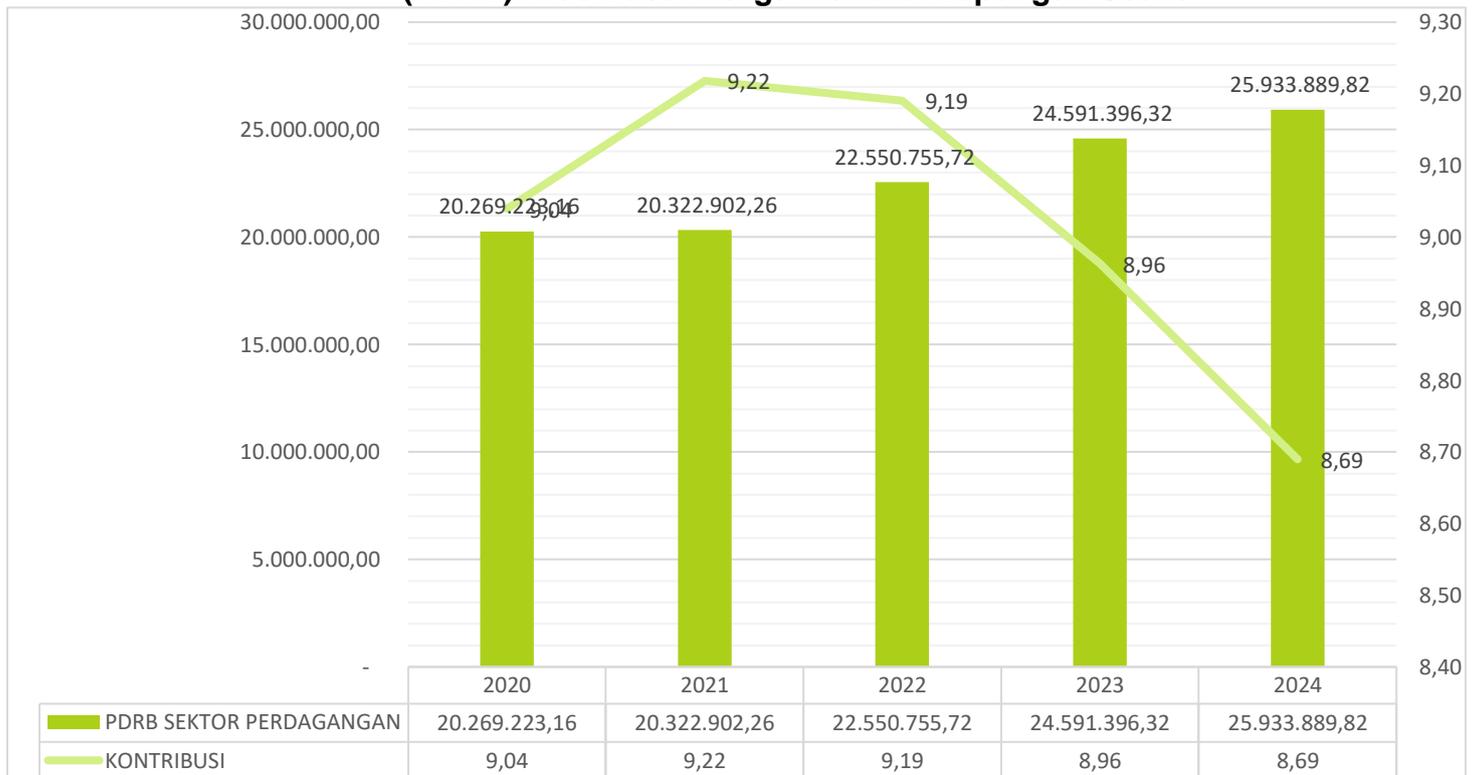
Pada Tahun 2024 PDRB Sektor Perdagangan mengalami peningkatan menjadi Rp. 25,9T dari sebelumnya sebesar 24,5T namun share terhadap PDRB secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar -0.27%. Hal Ini Disebabkan karena sektor lain terutama sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan yang lebih besar daripada sektor perdagangan yaitu sebesar 1,49%, Kategori kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ini meliputi kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir



(perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, pengudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB secara nilai dan persentase dapat dilihat pada tabel berikut :

**Gambar 3.2**  
**Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Menurut Lapangan Usaha**



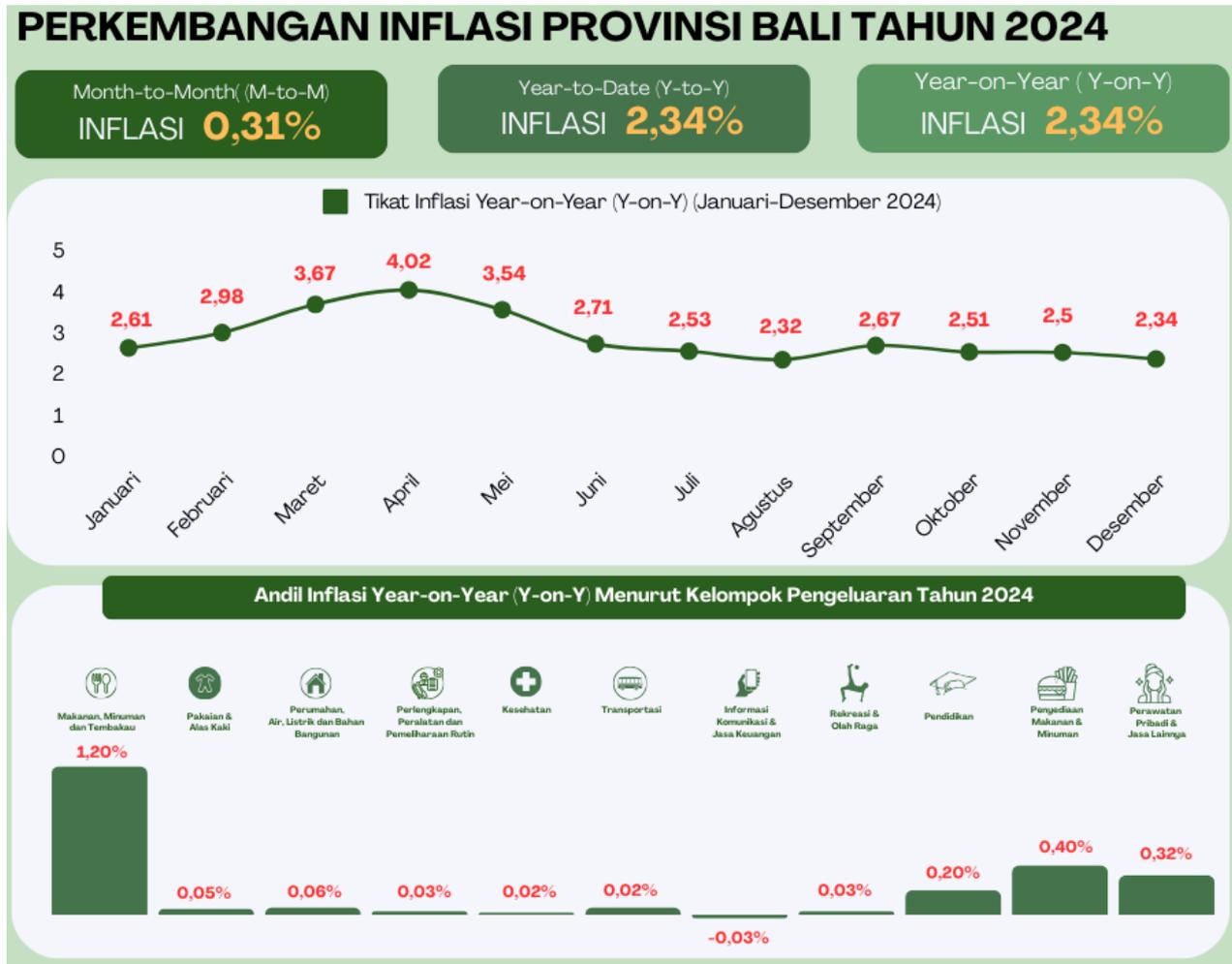
Sumber Data : BPS Provinsi Bali



Kebutuhan Pokok adalah merupakan kebutuhan utama masyarakat yang begitu kompleks untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, seperti : dapat hidup sehat, berpakaian, dan berteduh serta memperoleh pendidikan. Kebutuhan primer ini apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan dampak yang negatif. Target persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok secara nasional sebesar <math><10\%</math> dengan capaian realisasi perkembangan harga kebutuhan bahan pokok di Provinsi Bali lebih kecil dari target nasional **yaitu 9,9%**. Ini menandakan perkembangan harga kebutuhan bahan pokok di Provinsi Bali sangat stabil. Untuk menjaga agar kebutuhan barang pokok dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, maka ketersediaan dan harga mendapat perhatian yang utama. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali pada tahun 2024 menetapkan sasaran strategis Persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok.

Berdasarkan data yang di rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Sampai dengan akhir tahun 2024, secara kumulatif Provinsi Bali *Year-on-Year* mengalami inflasi 2,34% di gambarkan sebagaimana tabel berikut :

Gambar 3.3  
PERKEMBANGAN INFLASI PROVINSI BALI



Sumber Data: **BPS Provinsi Bali**

Rendahnya perolehan inflasi ini terkait dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam stabilitas harga, yaitu dengan dilakukannya pemantauan harga secara rutin dan kelancaran arus distribusi/ketersediaan stok, yang di lanjutkan dengan gerakan pelaksanaan Pasar Murah/ Operasi Pasar Sepanjang tahun 2024.

Pada tahun 2024 capaian kinerja terkait perkembangan harga kebutuhan perkembangan harga kebutuhan bahan pokok sebesar 9,9% diatas target yang ditetapkan yaitu kurang dari 7%. Seperti digambarkan pada tabel berikut :



TABEL 3.5

## PERKEMBANGAN HARGA KEBUTUHAN BAHAN POKOK TAHUN 2024

KOMODITI	Sat- uan	Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agu	Sept	Okt	Nop	Des	Rata- rata	Std- Dev	Kovar
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Beras Medium I	Kg	14.295	15.456	15.052	14.208	13.788	14.240	14.418	14.425	14.395	14.349	14.282	14.306	4.435	426	3,0
Beras Super I	Kg	15.430	16.708	16.268	16.235	15.604	15.670	16.058	16.064	15.995	15.995	16.768	16.950	16.145	473	2,9
Beras Medium (Beras SPHP)	Kg	11.045	10.900	10.814	10.872	12.014	12.014	12.139	12.129	12.000	11.985	11.924	11.922	1.647	552	4,7
Beras Premium	Kg	15.443	16.498	16.173	15.414	15.033	15.369	15.357	15.469	15.511	15.496	15.364	16.672	15.650	508	3,2
Minyak Goreng	Liter	17.141	16.851	17.471	17.585	17.775	17.705	17.714	17.647	17.950	17.968	18.277	19.068	17.763	556	3,1
Daging Babi	Kg	77.634	80.575	80.897	80.105	81.504	81.555	83.623	88.404	93.634	96.460	104.792	106.119	87.942	9963	11,3
Daging Sapi Has Luar	Kg	118.507	118.162	122.181	18.474	119.168	119.104	118.577	117.520	117.720	117.490	117.890	122.890	18.974	1759	1,5
Daging Ayam Ras	Kg	38.018	39.576	40.137	40.255	40.665	39.804	39.930	39.550	39.167	39.746	40.909	40.284	39.837	752	1,9
Telur Ayam Ras	Kg	26.927	28.151	30.291	28.738	28.583	28.420	28.007	27.829	27.839	27.924	27.827	28.549	28.257	802	2,8
Cabai Merah Besar	Kg	70.194	79.081	45.502	51.702	43.408	44.701	30.482	27.298	18.647	17.081	18.771	49.040	41.326	19965	48,3
Cabai Rawit Merah	Kg	38.590	70.621	37.491	34.335	30.076	30.980	75.527	37.637	34.025	35.230	29.365	70.822	3.725	17531	40,1
Bawang Merah	Kg	29.641	27.621	29.054	47.601	39.963	28.542	22.173	20.834	23.600	25.617	34.514	37.695	30.571	7971	26,1
Bawang Putih	Kg	34.003	36.011	37.807	38.191	38.934	36.155	35.954	36.255	36.536	36.508	37.791	39.174	6.943	1474	4,0
Kangkung	Kg	6.208	5.969	6.534	6.660	6.693	6.642	6.890	6.374	6.309	6.031	6.858	7.349	6.543	393	6,0
Jeruk Lokal	Kg	15.308	16.293	15.924	15.905	15.526	14.761	14.145	13.628	15.139	15.066	15.029	15.638	15.197	760	5,0
Ikan Tongkol	Kg	28.519	25.877	26.868	27.407	29.310	28.823	28.214	28.457	28.332	28.022	28.805	28.510	8.095	952	3,4
Kacang Panjang	Kg	11.360	13.821	12.008	16.346	11.155	12.342	10.528	10.914	10.809	10.670	12.040	17.664	12.471	2324	18,6
Pisang Ambon	Kg	15.643	16.589	17.156	16.868	17.670	17.277	17.684	17.377	18.015	17.322	17.132	17.405	17.178	612	3,6
Gulaku/Merk Sejenis (Putih)	Kg	16.951	17.228	17.650	18.072	18.091	17.863	17.859	17.916	17.912	17.897	18.062	18.043	17.795	357	2,0
Tepung Terigu Segitiga Biru	Kg	12.743	14.781	12.476	12.686	12.629	12.506	12.446	12.436	12.360	12.273	12.324	12.315	12.665	683	5,4
<b>KOVAR</b>															<b>9,9</b>	

**Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali**

Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan metode pengukuran kovar yang sebelumnya hanya dilakukan di 3 pasar pantauan yang berada di Denpasar dan hanya memantau 10 komoditas, sedangkan untuk tahun 2024 dilakukan di semua pasar tradisional dan pasar modern di seluruh Bali yang diinput kedalam aplikasi SIGAPURA oleh Disperindag Kabupaten/Kota dan memantau sebanyak 20 komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting. Untuk menjaga



stabilitas harga kebutuhan bahan pokok yang lebih stabil maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Antisipasi kelangkaan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi dari berbagai gejolak yang terjadi sebagai akibat adanya musim kemarau yang berkepanjangan dan pola permintaan yang meningkat berkenaan dengan hari hari keagamaan telah dilakukan antisipasi sebagai berikut :
  - Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* di dalam upaya pengendalian inflasi
  - Melakukan operasi pasar minyak goreng di pasar terhadap gejolak harga minyak goreng yang terjadi kenaikannya secara perlahan telah berdampak pada komoditi yang lain
  - Melaksanakan pasar murah harga menjelang hari-hari keagamaan atau event-event tertentu seperti adanya anomali cuaca untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga.
- b. Memfasilitasi peran serta petani/pelaku usaha produk agro dalam kegiatan pasar tani, pasar murah serta pasar lelang komoditas untuk mempermudah akses pemasaran yang sasarannya masyarakat, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatannya.

Selain itu untuk menggambarkan kondisi jumlah pasar tradisional dan pasar modern yang ada di 9 Kabupaten/Kota se-Bali pada tahun 2024, maka diuraikan pada tabel berikut :



**Tabel 3.6**  
**Data Pasar Tradisional dan Pasar Modern Provinsi Bali Tahun 2024**

No	Kabupaten	Pasar Tradisional (Unit)	Pasar Modern (Unit)		
			Berjejaring	Non Jejaring	Berjejaring + Non Jejaring
1	Denpasar	50	201	44	245
2	Badung	65	190	44	234
3	Tabanan	14	148	236	384
4	Jembrana	10	20	36	56
5	Buleleng	91	54	15	69
6	Karangasem	20	14	51	65
7	Klungkung	27	10	86	96
8	Bangli	4	30	20	50
9	Gianyar	62	184	0	184
<b>TOTAL</b>		<b>343</b>	<b>851</b>	<b>532</b>	<b>1.383</b>

**Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali**

Untuk kelancaran distribusi Barang Pokok Penting maka di tahun 2024 dilaksanakan pemahaman kepada distributor melalui rapat kordinasi. Dengan diberikannya pemahaman kepada para distributor melalui rapat koordinasi maka diharapkan distribusi barang pokok penting pada tahun 2024 berjalan lancar. Berikut data Distributor, Sub Distributor dan Agen Provinsi Bali Tahun 2024 :

**Tabel 3.10**  
**Data Distributor, Sub Distributor dan Agen Provinsi Bali**

No	Kabupaten	Jumlah
1	Denpasar	10
2	Badung	118
3	Tabanan	9
4	Jembrana	18
5	Buleleng	14
6	Karangasem	20
7	Klungkung	12
8	Bangli	23
9	Gianyar	16
<b>TOTAL</b>		<b>240</b>

**Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali**



Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.

Indeks keberdayaan konsumen atau IKK adalah indeks yang mengukur kesadaran, pemahaman, dan kemampuan menerapkan hak dan kewajiban konsumen dalam berinteraksi dengan pasar. Pada tahun 2024 Indeks keberdayaan konsumen Provinsi Bali adalah 59,65, target ini lebih baik dibandingkan dari tahun 2023 yaitu sebesar 56,05 atau meningkat sebesar 3,6 point.

Keberhasilan capaian kinerja tidak terlepas dari strategi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali diantaranya:

1. Menciptakan konsumen cerdas melalui edukasi sosialisasi kepada konsumen dan pelaku usaha serta masyarakat sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya selaku konsumen maupun pelaku



usaha, serta mengetahui tempat untuk mengadakan bila terjadi sengketa dengan pelaku usaha.

2. Membentuk BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dengan melakukan proses seleksi untuk menjaring unsur pemerintah, pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota BPSK Kota Denpasar Periode 2021-2026.

Berdasarkan proses yang telah dilaksanakan maka pada tahun 2021 telah terbentuk BPSK Kota Denpasar dengan Nomor Surat Tanda Daftar BPSK : 37/STD/PKTN/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021.

3. Melaksanakan mediasi pengaduan konsumen oleh BPSK sepanjang tahun 2024 sebanyak 7 kasus yang didominasi oleh kasus produk dan jasa.
4. Melakukan pengawasan barang beredar, utamanya produk-produk ber-SNI. Produk yang diawasi: mainan anak-anak, pakaian bayi, melamin peralatan makanan dan minuman, air minum dalam kemasan, kompor gas, pompa air listrik seklar, kabel listrik, penanak nasi, lampu hemat energi (LHE)
5. Melaksanakan pengawasan penerapan tertib niaga dan legalitas pelaku usaha untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha

SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah label yang menandakan barang tersebut sesuai dengan standar produk yang ada di Indonesia. Dengan adanya label SNI ini masyarakat bisa mengetahui barang mana yang layak dipakai dan



tidak layak. Label SNI ini bisa ditemukan pada macam-macam barang. Salah satunya adalah pada mainan anak, helm, peralatan elektronik, accu, pompa air listrik, semen, kabel dan sebagainya. Dengan demikian pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali melakukan pengawasan terhadap sebanyak 10 Produk SNI di Provinsi Bali yang diawasi dari jumlah produk SNI yang ditetapkan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional) sebanyak **131** Produk atau **sebesar 9,93 persen**. Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali juga melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa dengan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi dibuktikan dengan 123 laporan pelaksanaan pengawasan barang dan jasa yang dilengkapi dengan dengan manual kartu garansi pada produk seperti kompor gas, kipas angin setrika listrik, penanak nasi serbaguna/*magic com*.

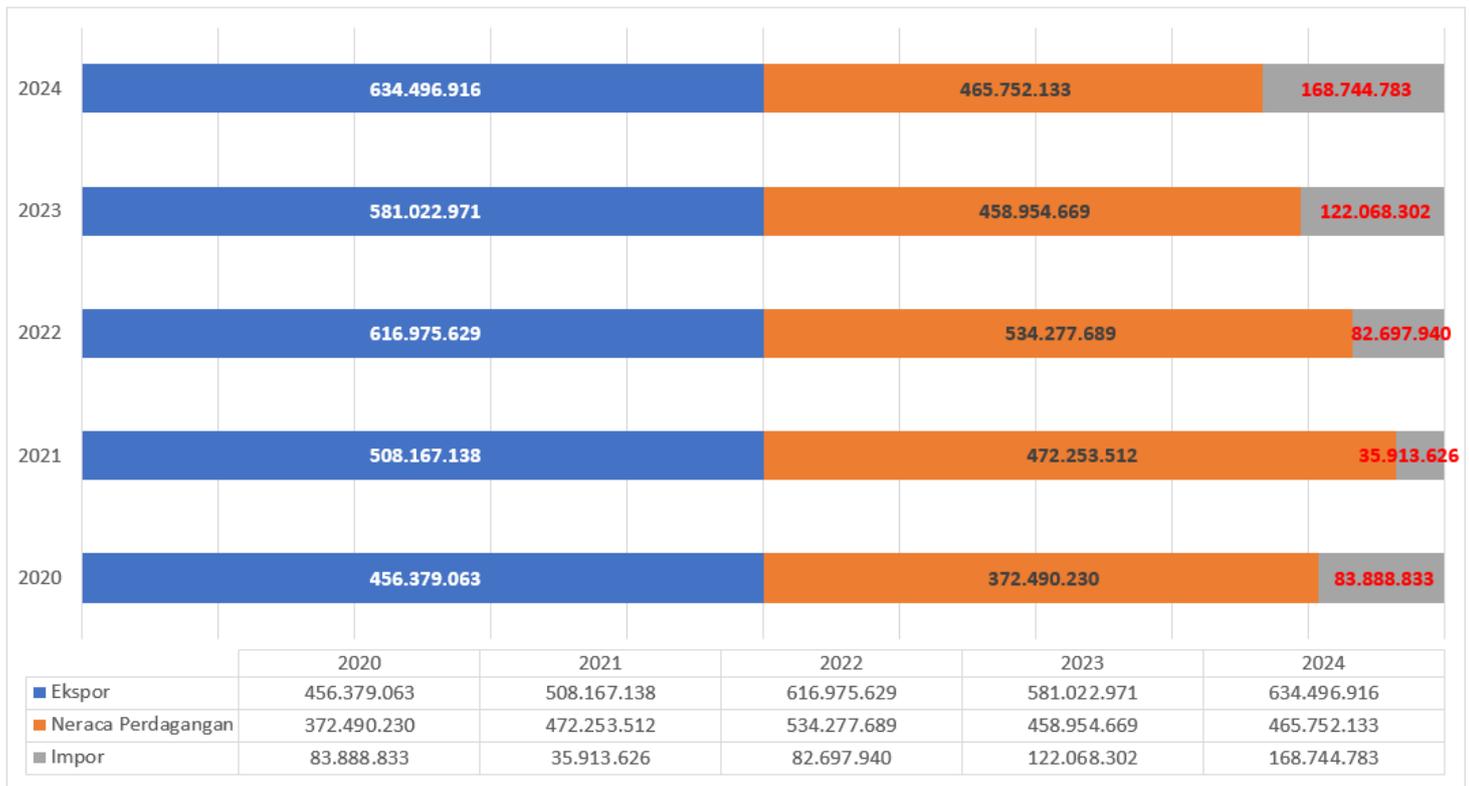
Pengawasan produk SNI dan produk yang wajib melampirkan kartu manual garansi pada penjualan tetap harus dilakukan, bahkan lebih ditingkatkan nantinya pada tahun 2024 karena pengawasan harus dilakukan secara *continue*. Sehingga konsumen terlindungi dari penggunaan produk yang tidak bermutu dan produsen akan memproduksi produk sesuai standar dan pedagang akan menjual produk yang bermutu.

Selain itu peningkatan PDRB Sektor Perdagangan Bali ditunjang dari sektor perdagangan luar negeri (ekspor) dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke



negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Ekspor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Penjualan barang oleh eksportir keluar negeri dikenai berbagai ketentuan dan pembatasan serta syarat-syarat khusus pada jenis komoditas tertentu termasuk cara penanganan dan pengamanannya. Setiap negara memiliki peraturan dan ketentuan perdagangan yang berbeda-beda.

**Gambar 3.4**  
**Perkembangan Ekspor Provinsi Bali Dari Tahun 2020 – 2024**



**Sumber Data: BPS BALI**

Nilai ekspor provinsi bali tahun 2024 berdasarkan Data BPS Provinsi Bali mengalami peningkatan sebesar 1,48% peningkatan ini belum signifikan karena adanya penurunan permintaan dari negara mitra dagang dengan kinerja ekonomi,



penurunan ekspor yang terjadi di semua sektor juga adanya kebijakan pengetatan moneter dari negara tujuan ekspor, Selain itu ada beberapa masalah yang masih perlu mendapatkan perhatian agar ditahun berikutnya ekspor bali dapat meningkat antara lain design produk yang tidak sesuai selera pasar (*old style*), harga tidak bisa bersaing serta kurangnya promosi produk ekspor. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain dengan meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kemampuan eksportir, memfasilitasi dengan lembaga keuangan dan dituntut inovasi atau kreatifitas dari pelaku usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama antara pelaku usaha, pemerintah dan perguruan tinggi. Sebagai pendukung ekspor, UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang melakukan pengujian komoditi ekspor (kopi, kakao, panili), sampai dengan tahun 2024 telah melakukan kegiatan pengujian mutu barang dan sertifikasi sebanyak 86 pengujian dari target 45 pengujian.

Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Eksportir terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk mengekspor barang tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali melakukan upaya dengan menumbuhkan wirausaha baru dari kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang potensial untuk dapat dikembangkan menjadi UKM ekspor melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan ekspor-impor, promosi produk unggulan pada pameran, sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri, serta melalui peningkatan kerja sama dengan Asosiasi dan instansi terkait untuk mendorong



eksportir baru. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 767 bertambah 71 eksportir dari tahun 2023 atau meningkat sebesar 8,79%.

**TABEL 3.8**  
**JUMLAH EKSPORTIR BALI 2024**

Tahun	Jumlah Eksportir
2020	529
2021	593
2022	636
2023	705
2024	676

*Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali*

Dalam rangka membantu para pelaku usaha meningkatkan akses pasar sampai ke level internasional, promosi produk unggulan pada pameran yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali melalui Bidang Perdagangan Luar Negeri, maka berikut diuraikan Pelaku usaha yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali pada tahun 2024 melalui dana dekonsentrasi, sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Pelaku Usaha yang difasilitasi Pameran Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali**

No	Nama Pameran	Produk	Tanggal	Lokasi
1	<b>PT. Mercusuar Uluwatu</b>	Kopi Arabika	09-12 Oktober 2024	Trade Expo Indonesia
2	<b>Cho-Jaensaan</b>	Cokelat	09-12 Oktober 2024	Trade Expo Indonesia
3	<b>D'Best Madu Bali</b>	Madu	09-12 Oktober 2024	Trade Expo Indonesia
4	<b>CV. Cacao Tabon Bali</b>	Cokelat	09-12 Oktober 2024	Trade Expo Indonesia
5	<b>Naba Silver Jewelry</b>	Silver	09-12 Oktober 2024	Trade Expo Indonesia



No	Nama Pameran	Produk	Tanggal	Lokasi
6	<b>CV. Bali Pure</b>	VCO dan Kosmetik	09-12 Oktober 2024	Trade Expo Indonesia
7	<b>Pagi Motley</b>	Kain Warna Alam	09-12 Oktober 2024	Trade Expo Indonesia
8.	<b>Dewi Sita'Leather</b>	Tas Kulit	09-12 Oktober 2024	Trade Expo Indonesia

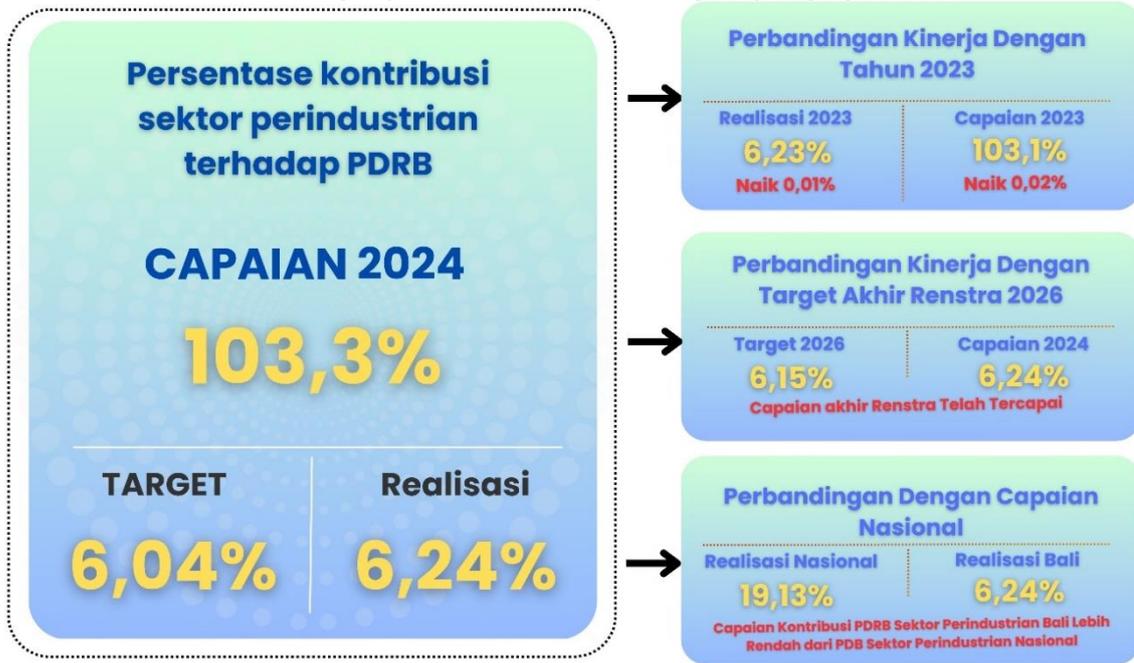
**Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali**

### 3.2.2 Sasaran Strategis Dua

#### Sasaran Strategis 2

#### **MENINGKATNYA DAYA SAING INDUSTRI**

Peningkatan pembangunan ekonomi dilakukan melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dipandang sebagai indikator yang sangat penting serta memiliki banyak manfaat karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan dan perkembangan ekonomi, keunggulan dan kelemahan yang terdapat pada berbagai sektor dalam struktur perekonomian. Maka dari itu kontribusi sektor industri merupakan salah satu komponen dalam menghitung nilai PDRB di Provinsi Bali, realisasi PDRB sektor perindustrian di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.5  
ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 SASARAN 2

Sumber Data : BPS Bali

Pada sasaran 2 Meningkatnya Daya Saing Industri ditetapkan satu indikator kinerja yaitu :

- Pada tahun 2024 indikator Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali memiliki target sebesar 6,04% dengan realisasi sebesar 6,24% dan tingkat capaian sebesar 103,31%

Analisa dan data pendukung atas capaian indikator-indikator sasaran strategis dua adalah sebagai berikut:

### 3.2.2.1 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam bahasa Inggris disebut *Gross Domestic Product*, merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan, di suatu negara dalam suatu



periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah provinsi, kabupaten atau kota digunakan PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto/Gross Domestic Regional Product*). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Tujuan Data PDRB tersebut adalah untuk menganalisis seberapa besar kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Provinsi Bali seperti di gambarkan pada tabel 3.12



**Gambar 3.6**  
**Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**



**Sumber Data : BPS Provinsi Bali**

### 3.2.2.2 Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi, dan Nilai Produksi

#### Industri

Berbagai tantangan/permasalahan yang dihadapi daya saing industri Bali antara lain: keterbatasan bahan baku, penguasaan teknologi masih kurang, permintaan/selera pasar yang cepat berubah, masuknya produk yang sejenis dengan harga dan mutu yang lebih bagus, kurangnya inovasi/kreatifitas, masih banyaknya pelaku usaha kurang menyadari akan pentingnya melindungi hasil karya, kemasan produk-produk yang dihasilkan industri bali masih banyak yang kurang menarik/sesuai standar, tuntutan sertifikasi produk, masih rendahnya



kemampuan SDM memanfaatkan teknologi dalam berproduksi maupun pemasaran, serta masih lemahnya permodalan serta persaingan dunia global yang semakin tajam.

Strategi yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut antara lain: kerjasama bahan baku dengan daerah penghasil, pelatihan teknik produksi, memfasilitasi HKI, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM baik produk maupun kemasannya, memfasilitasi sertifikasi, memfasilitasi akses pembiayaan, pelatihan-pelatihan berbasis IT dan memfasilitasi pemasaran.

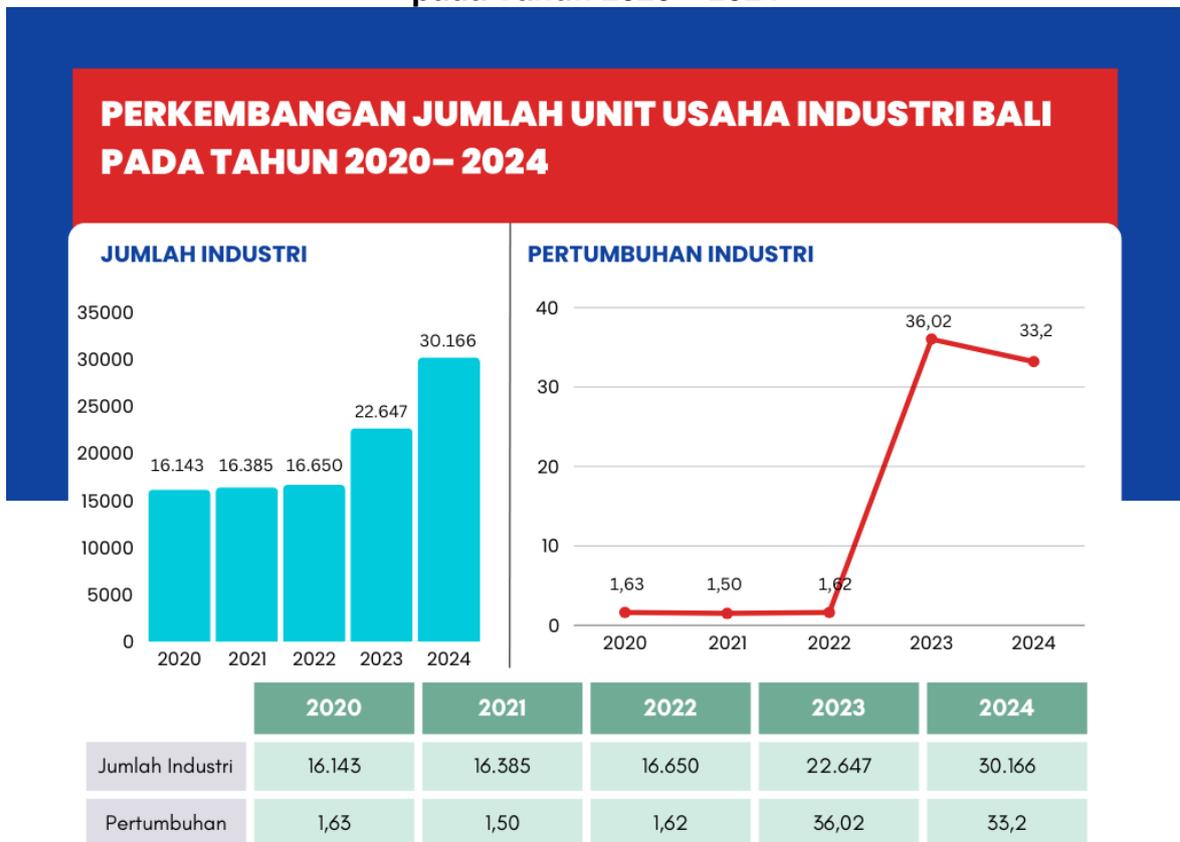
Sehingga dapat meningkatkan jumlah unit usaha dan tenaga kerja industri Provinsi Bali serta nilai ekspor produk-produk industri dapat juga dijadikan indikasi bahwa industri Bali mempunyai daya saing/produktifitasnya meningkat. Berikut diuraikan gambaran kondisi industri di Bali baik unit usaha, tenaga kerja, investasi dan nilai produksi, sebagai berikut :

**a. Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Bali Pada Tahun 2020 – 2024**

Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Untuk jumlah unit usaha pada tahun 2024 sebanyak 30.166 unit usaha, dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 22.647 unit usaha atau meningkat sebesar 33,2% dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



**Gambar 3.7**  
**Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Bali**  
**pada Tahun 2020 – 2024**



**Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali**

Dengan meningkatnya perkembangan jumlah unit usaha industri Bali setiap tahunnya, menandakan bahwa unit usaha sektor industri di Bali sudah tumbuh dan berkembang dengan baik.

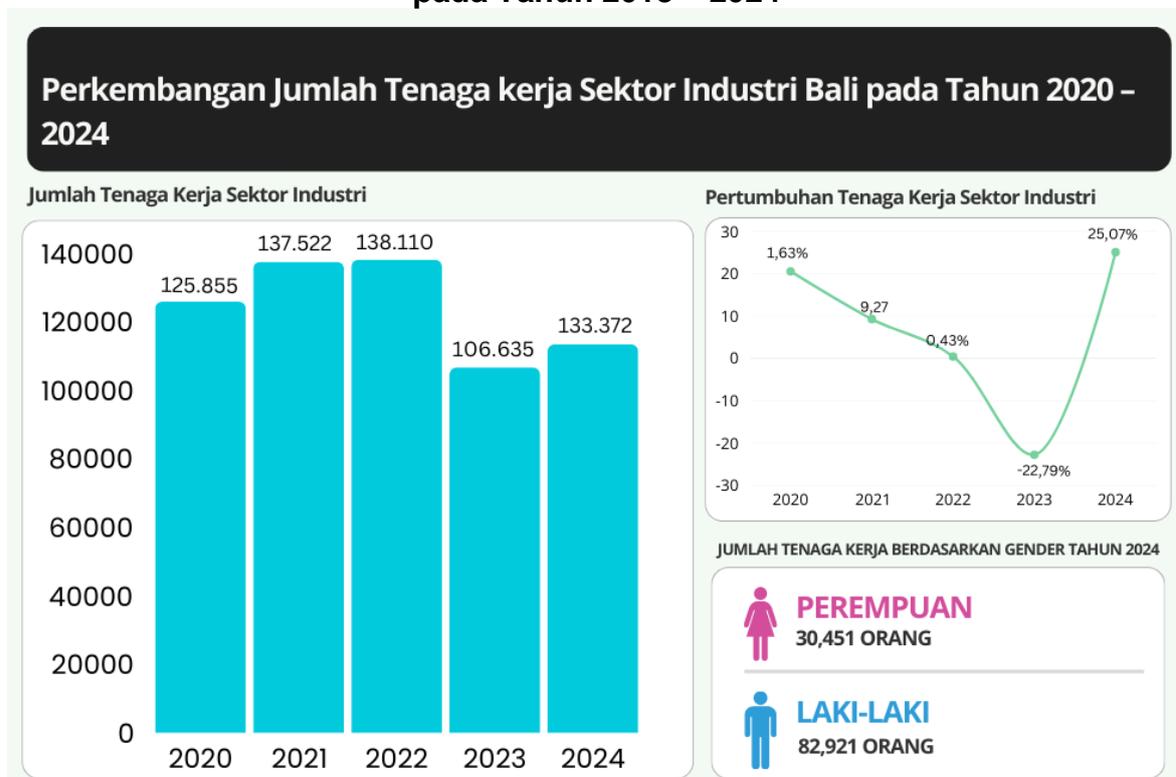
**b. Perkembangan Jumlah Tenaga kerja Sektor Industri Bali Pada Tahun 2020– 2024**

Tenaga kerja sektor industri adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dalam sektor industri guna menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Adapun perkembangan jumlah tenaga kerja sektor industri di Bali dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 untuk



semua skala industri baik industri kecil hingga industri menengah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Untuk perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri di Bali tahun 2024 sebanyak 133.372 Orang (82.921 Pria dan 30.451 Wanita) capaian ini meningkat dibandingkan dari tahun 2023 sebanyak 106.635 orang. Perkembangan jumlah tenaga kerja sektor industri di Bali dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Grafik 3.14 berikut:

**Gambar 3.8**  
**Perkembangan Jumlah Tenaga kerja Sektor Industri Bali**  
**pada Tahun 2018 – 2024**



**Sumber Data:** *Disperindag Provinsi Bali*

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah tenaga kerja sektor industri Bali mengalami penurunan pada tahun 2024 karena adanya perbaikan data dari kabupaten kota data yang ditarik berdasarkan Data OSS (*Online Single Submission*) sehingga data yang masuk adalah industri yang



sudah memiliki ijin, sedangkan data tahun 2022 kebanyakan industrinya merupakan industri belum memiliki ijin.

### **3.2.2.3 IMPLEMENTASI PERGUB NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA MINUMAN FERMENTASI DAN / ATAU DESTILASI KHAS BALI**

Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan PERGUB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang “Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali”. Minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali terdiri atas tuak bali, brem bali, arak bali, produk artisanal. Brem atau arak bali untuk upacara keagamaan yang bertujuan membangun standardisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas produk minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali dan melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. Secara teknis, dijelaskannya perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangan melalui penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali. Diantaranya pengembangan tata kelola pengadaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali; pengembangan standardisasi pengadaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali, pendampingan pengurusan dan pemeliharaan kekayaan intelektual, dan pemberian label branding brem/arak bali pada produk-produk fermentasi dan/atau destilasi khas bali dalam produksinya masih menggunakan proses secara tradisional. Maka dari itu menindaklanjuti Peraturan Gubernur tersebut, pada tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali telah melakukan langkah – langkah lanjutan sebagai berikut:



- a) Sosialisasi Pergub telah dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
- b) Pengembangan teknologi pengolahan arak di Kabupaten Karangasem dan Buleleng bersinergi dengan Brista Provinsi Bali dan Diskop UKM Provinsi Bali
- c) Memediasi penentuan harga patokan petani sebesar Rp.40.000 per liter
- d) Permohonan tentang keringanan tarif cukai arak Bali dalam proses pendalaman dan pembahasan yang komprehensif di Kemenkeu
- e) Fasilitasi kerjasama antara koperasi petani arak dengan industri (lokal Bali) dan distributor.

#### **3.2.2.4 IMPLEMENTASI PERDA NO. 8 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI BALI TAHUN 2020 – 2040**

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam melaksanakan pembangunan industri di daerah dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Untuk itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah dan dukungan seluruh *stakeholder* terkait serta koordinasi yang baik di tingkat pusat dan daerah, pada tahun 2020 pemerintah provinsi Bali meluncurkan PERDA NO. 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020–2040 maka dari itu menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut pada tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali telah melakukan langkah–langkah lanjutan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Tingkat Provinsi kepada Kabupaten/Kota



2. Pembentukan Tim Evaluasi RPIK No SK.19/03-I/HK/2021 yang akan melakukan evaluasi terhadap Kajian dan Draft Perda yang diajukan oleh Kabupaten/Kota
3. 5 Kabupaten dan 1 kota telah memiliki RPIK yaitu Denpasar dan Kabupaten Gianyar .
4. Sebanyak 3 Kabupaten masih belum RPIK yaitu Tabanan, klungkung, bangli
5. Kabupaten yang telah memiliki RPIK, Kabupaten Karangasem (Perda No. 14/2022 RPIK Karangasem), Kabupaten Buleleng (Perda No. 7/2023 RPIK Buleleng), Kabupaten Jembrana(Perda No. 10/2023 RPIK Jembrana), Kabupaten Badung (Perda No. 6/2023 RPIK Badung), Kota Denpasar (Perda No 6 /2024 RPIK Denpasar)

#### **3.2.2.5. Fasilitas Desain**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali melalui UPTD Rumah Kreatif terus berkomitmen untuk mendukung perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan menyediakan berbagai fasilitas yang bertujuan meningkatkan daya saing produk lokal. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi IKM dalam mendesain logo, kemasan produk, desain promosi, layanan katalog digital, serta pembuatan video promosi singkat.

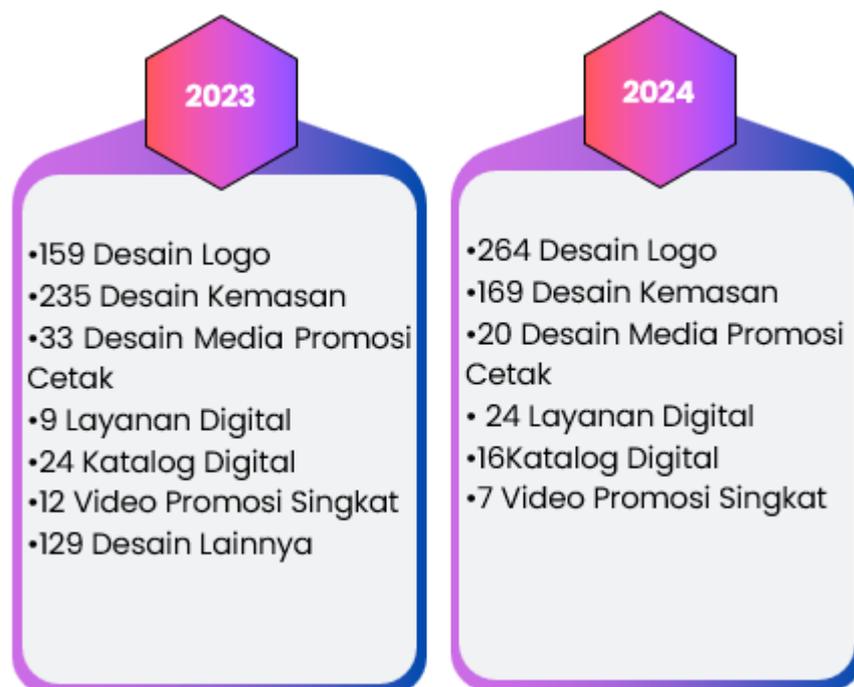
Melalui program ini, Disperindag membantu IKM dalam menciptakan identitas merek yang kuat melalui desain logo yang menarik dan profesional. Selain itu, desain kemasan produk yang modern dan fungsional juga diprioritaskan untuk meningkatkan nilai jual dan daya tarik di pasar.



Tidak hanya berhenti di situ, Disperindag juga memfasilitasi pembuatan materi promosi yang kreatif dan efektif guna memperluas jangkauan pemasaran. Dengan memanfaatkan layanan katalog digital, produk IKM dapat lebih mudah ditemukan oleh konsumen, baik di pasar lokal maupun global. Ditambah lagi, video promosi singkat yang informatif dan menarik diharapkan mampu meningkatkan visibilitas produk di era digital saat ini.

Melalui berbagai fasilitas ini, Disperindag berupaya membantu IKM agar dapat bersaing secara efektif di pasar yang semakin kompetitif. Program ini tidak hanya memperkuat branding dan pemasaran produk lokal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Adapun jumlah desain yang dibuat oleh tenaga ahli yang ada Disperindag Provinsi Bali sebagai berikut :

**Gambar 3.9**  
**Fasilitas Desain UPTD – Rumah Kreatif**  
**pada Tahun 2023 – 2024**





### 3.2.2.6. Pendampingan dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual memiliki perlindungan berbasis hukum agar terproteksi dan sah dicatatkan oleh negara. Terdapatnya payung hukum yang melindungi kekayaan intelektual, yaitu dapat menghindari plagiasi dan penyalahgunaan oleh pihak lain. Mendaftarkan di sentra UAD akan memudahkan untuk akreditasi dan beberapa potongan biaya dari harga yang telah ditetapkan oleh DJKI. Serta yang tidak kalah penting adalah fasilitasi proses pendaftaran merek dagang HKI melalui kuota klinik HKI Kemenperin. Berikut data pelaku usaha industri yang telah di fasilitasi dalam proses pendaftaran merek dagang (HKI) melalui kuota klinik HKI Kemenperin

**Tabel 3.10**  
**REKAP PENDAMPINGAN DAN FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**UPTD. RUMAH KREATIF DINAS PERINDUSTRIAN DAN**  
**PERDAGANGAN PROVINSI BALI 2023 dan 2024**

No	Uraian	2023	2024
1	Merek	168	50
2	Hak Cipta	96	20
3	Desain Industri	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>264</b>	<b>70</b>

**Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali**

Tantangan kedepan yang dihadapi antara lain : perlunya inovasi yang tinggi agar produk yang dikembangkan dapat bersaing, peningkatan kualitas SDM dalam teknik produksi, meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam produksi dan pemasaran, memiliki merek (HKI), dan melakukan peningkatan mutu produk secara berkelanjutan agar mampu bersaing dengan produk impor.



### 3.2.3 Sasaran Strategis Tiga

#### SASARAN STRATEGIS 3

#### MENINGKATNYA DAYA SAING EKONOMI LOKAL

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global dan nasional, daya saing ekonomi lokal Bali menjadi faktor kunci dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat sektor-sektor unggulan berbasis kearifan lokal, meningkatkan nilai tambah produk dan jasa, serta mendorong inovasi dan digitalisasi ekonomi daerah.

Penguatan daya saing ekonomi Bali dilakukan melalui optimalisasi sektor pariwisata berbasis budaya dan alam, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, diversifikasi ekonomi diarahkan pada sektor pertanian organik, perikanan berkelanjutan, dan industri berbasis sumber daya lokal yang memiliki potensi ekspor.

Pemerintah daerah berperan dalam menciptakan kebijakan yang mendukung investasi ramah lingkungan, mendorong kemitraan antara pelaku usaha lokal dan global, serta menyediakan infrastruktur ekonomi yang modern dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri juga menjadi prioritas utama dalam memperkuat daya saing tenaga kerja lokal.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi lokal, implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 99 Tahun 2018 tentang **Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali** menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi berbasis potensi



daerah. Regulasi ini mengatur kewajiban bagi hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan untuk memanfaatkan minimal 30% produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali, sehingga memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, serta produsen industri kecil dan menengah.

Implementasi Pergub ini juga didukung dengan penguatan sistem distribusi dan pemasaran produk lokal, termasuk digitalisasi pemasaran serta fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha lokal dengan sektor pariwisata dan perhotelan. Dengan demikian, ekosistem ekonomi Bali dapat tumbuh lebih berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan berbasis kearifan lokal yang tetap menjaga keseimbangan antara ekonomi, budaya, dan lingkungan. Capaian kinerja Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal digambarkan pada grafik berikut:

**Gambar 3.9**  
**Realisasi Persentase Produk Yang Terserap Pasar**



**Sumber Data : Disperindag Bali**



Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali terus berkomitmen dalam mendukung perkembangan produk lokal Bali dengan melaksanakan program pembinaan ke berbagai toko sandang. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk lokal mendapatkan ruang lebih besar di pasar, dengan target minimal 30% dari total produk yang dijual di setiap toko sandang berasal dari produsen lokal Bali.

Melalui kegiatan ini, Disperindag memberikan pendampingan kepada pemilik toko dalam memilih dan mengutamakan produk sandang dari pengrajin dan pelaku usaha lokal. Selain itu, Disperindag juga melakukan sosialisasi mengenai manfaat penggunaan produk lokal, baik dari segi kualitas, keberlanjutan ekonomi, hingga pelestarian budaya khas Bali.

Tak hanya itu, program ini juga melibatkan kerja sama dengan para perajin dan UMKM untuk memastikan ketersediaan produk berkualitas yang memenuhi kebutuhan pasar. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan produk sandang lokal dapat lebih dikenal dan diminati masyarakat luas, sekaligus meningkatkan daya saing usaha lokal di tengah persaingan pasar modern.

Melalui langkah konkret ini, Disperindag berperan aktif dalam memperkuat ekosistem perdagangan yang berpihak pada produk lokal, sehingga ekonomi daerah dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

### **3.3 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir**

Capaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir, biasanya dilakukan dengan menganalisis



beberapa matrik atau indikator kunci kinerja organisasi. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk melakukan perbandingan di mana kinerja telah meningkat atau menurun secara signifikan. Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan atau penurunan tersebut. Maka untuk mengukur kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali digambarkan sebagai berikut :

**TABEL 3.11**  
**Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir**

Tujuan	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan yang Berdaya Saing	Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9%	9%	9%	9%	9%	9,04%	9,22%	9,19%	8,97%	8,69 %
	Meningkatnya sektor Perindustrian terhadap PDRB	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	6,44%	6,68%	6,58%	6,62%	6,24%
	Meningkatnya daya saing ekonomi lokal	Persentase Produk yang terserap pasar	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%

Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Dengan fokus yang tajam pada penyediaan layanan yang berkualitas, organisasi ini telah berhasil mencapai sejumlah pencapaian yang signifikan. Prestasi organisasi ini juga tercermin dalam kemampuannya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dengan fokus yang jelas pada pencapaian hasil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali telah berhasil meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam semua aspek operasional.



### 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dapat dijabarkan pada table dibawah ini:

**TABEL 3.12**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

No	TUJUAN / SASARAN	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	8,69 %	9,10%	95,49
2	Meningkatnya sektor Perindustrian terhadap PDRB	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	6,24%	6,15%	101,46%
3	Meningkatnya daya saing ekonomi lokal	Persentase Produk yang terserap pasar	30%	32%	93,75%

**Sumber: Disperindag Provinsi Bali**

Capaian kinerja organisasi ini tidak terlepas dari komitmen kuat dari kepemimpinan dan staf, serta dari dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat, mitra kerja, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Dengan terus mempertahankan fokus pada inovasi, efisiensi, dan pelayanan yang berkualitas agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Balidapat terus memperkuat kinerjanya dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di masa mendatang. Kontribusi perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,27%. Meskipun secara umum nilai PDRB sektor perdagangan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar



1.342.493,50 (Juta Rupiah) dibanding tahun 2023. hal ini disebabkan karena PDRB secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 24.083.326,95 (Juta Rupiah) namun tidak di imbangi oleh peningkatan yang signifikan dari sektor perdagangan. Hal ini disebabkan karena masyarakat selektif dalam pengeluaran keuangan untuk kebutuhan konsumtif.

### 3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Dalam proses ini, kami mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Secara keseluruhan, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, kami mengidentifikasi solusi yang sesuai untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja kami guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat, digambarkan sesuai tabel berikut :

**TABEL 3.13**  
**Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9%	8,69 %	96,55	Hal ini disebabkan karena PDRB secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 24.083.326,95 (Juta Rupiah) namun tidak di imbangi oleh peningkatan yang	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri , Meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal sehingga memenuhi persyaratan



No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						signifikan dari sector perdagangan. Hal ini disebabkan karena masyarakat selektif dalam pengeluaran keuangan untuk kebutuhan konsumtif.	sertifikasi produk yang akan dipasarkan di level nasional maupun internasional
2	Meningkatnya sektor Perindustrian terhadap PDRB	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	6,04%	6,24%	103,3%	Hal ini disebabkan karena PDRB secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 24.083.326,95 (Juta Rupiah) namun tidak di imbangi oleh peningkatan yang signifikan dari sector perindustrian hal ini disebabkan karena produk ikm yang dihasilkan belum memenuhi standar yg telah ditetapkan pemerintah seperti sertifikasi halal, SVLK, TKDN dll	Meningkatkan daya saing produk industri lokal bali
3	Meningkatnya daya saing ekonomi lokal	Persentase Produk yang terserap pasar	30%	30%	100%	Disperindag memberikan pendampingan kepada pemilik toko yan ada di Bali dalam memilih dan mengutamakan produk sandang dari pengrajin dan pelaku usaha lokal. Selain itu, Disperindag juga melakukan sosialisasi mengenai manfaat penggunaan produk lokal, baik dari segi kualitas, keberlanjutan ekonomi, hingga pelestarian budaya khas Bali.	

### 3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbandingan pencapaian kinerja, anggaran, tujuan dan sasaran untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan/sasaran, serta mengukur tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja organisasi yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan kinerja, peningkatan akuntabilitas



kinerja, serta efisiensi dalam perencanaan penganggaran. Secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.14**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9%	8,69 %	96,55	19.852.806.186	18.175.991.769	91,55	8,45
Meningkatnya sektor Perindustrian terhadap PDRB	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	6,04%	6,24%	103,3%	2.810.205.480	2.674.592.753	95,17	4,83
Meningkatnya daya saing ekonomi lokal	Persentase Produk yang terserap pasar	30%	30%	100%	272.598.080,00	272.566.980	99,99	0,01

### 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Analisis keberhasilan dan kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui capaian serta relasi antara indikator sasaran strategis dengan indikator capaian kegiatan dan sub kegiatan, secara ringkas digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.15**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program/Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	8.96%	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<i>Indeks Keberdayaan Konsumen</i>	59,65	Menunjang
			<i>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Konsumen Cerdas</i>	100 %	
			☀ Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK yang Aktif	1 BPSK	



Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program/Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7
			Perlindungan Konsumen  ☼ Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen  <b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>  ☼ Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen  <b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>  Pengembangan Layanan Pengujian  <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>  <b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</b>  ☼ Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM yang Aktif  <b>Persentase Pelaku usaha yang menerapkan Tertib Niaga</b>  <b>Persentase Produk yang sesuai dengan ketentuan</b>  Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi  <b>Jumlah sertifikat hasil pengujian yang diterbitkan</b>  Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang  <b>Jumlah Pasar ber SNI</b>  <b>Jumlah Pasar yang dibina</b>  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3 LPKSM  50 %  50 %  195 Laporan  86 Sertifikat  86 Dokumen  1 Pasar  2 Pasar  2 Laporan	Menunjang
			<b>Program Pengembangan Ekspor</b>  <b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b>  ☼ Peningkatan Citra Produk Ekspor	<b>Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif</b>  <b>Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat akses pasarnya</b>  Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina untuk peningkatan promosi	56,79 %  2 Pelaku Usaha  15 Pelaku Usaha	



Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program/Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya sektor Perindustrian terhadap PDRB	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	6,24%	☀ Peningkatan Citra Produk Ekspor	Pameran Dagang Internasional/Nasional	8 Pelaku Usaha	Menunjang
			<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>85,14</b>	
			<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>	<b>Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal</b>	<b>14197</b> Dokumen	
			☀ Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	<b>14197</b> Dokumen	
			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang</b>	<b>7,5 %</b>	
			<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>Persentase Industri yang dibina</b>	<b>7,5 %</b>	
Meningkatnya daya saing ekonomi lokal	Persentase Produk yang terserap pasar	30%	☀ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	7 Laporan	Menunjang
			☀ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Laporan	
			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali</b>	<b>30 %</b>	Menunjang
			<b>Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali</b>	<b>30 %</b>	
			☀ Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer	5 Laporan	

Selama beberapa tahun terakhir, kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah menunjukkan capaian



yang baik, mencerminkan komitmen mereka dalam memajukan sektor industri dan perdagangan di provinsi bali. Melalui program-program pelatihan, bimbingan teknis, dan akses ke pasar yang lebih luas, Disperindag telah membantu para pelaku usaha lokal meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka.

**Tabel 3.16**  
**Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

NO	Program/Kegiatan/ sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>921.432.840,00</b>	<b>865.198.648,00</b>	<b>93,89%</b>
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota</b>	498.711.340,00	498.630.140,00	99,98%
	☼ Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	456.000.000,00	456.000.000,00	100,00%
	☼ Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	42.711.340,00	42.630.140,00	99,81%
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	146.873.880,00	<b>106.236.190,00</b>	72,33%
	☼ Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	146.873.880,00	106.236.190,00	72,33%
<b>3</b>	<b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	275.847.620,00	260.332.318,00	<b>94,37</b>
	☼ Pengembangan Layanan Pengujian	275.847.620,00	260.332.318,00	<b>94,37</b>
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	272.598.080,00	272.566.980	<b>99,98%</b>
<b>4</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	272.598.080,00	272.566.980	<b>99,98%</b>
	☼ Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	272.598.080,00	272.566.980	<b>99,98%</b>
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	111.426.100,00	75.207.707,00	67,50%
<b>5</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</b>	111.426.100,00	75.207.707,00	67,50%
	☼ Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	111.426.100,00	75.207.707,00	67,50%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	2.615.308.500,00	2.515.392.873,00	96,18%



NO	Program/Kegiatan/ sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
6	<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	2.615.308.500,00	2.515.392.873,00	96,18%
	☼ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2.317.081.720,00	2.217.166.093,00	95,69%
	☼ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	298.226.780,00	298.226.780,00	100,00%
E	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>49.213.800,00</b>	<b>46.757.000,00</b>	<b>95,01%</b>
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	49.213.800,00	46.757.000,00	95,01%
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	49.213.800,00	46.757.000,00	95,01%
F	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	349.991.600,00	315.796.717,00	90,23%
8	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b>	349.991.600,00	315.796.717,00	90,23%
	☼ Peningkatan Citra Produk Ekspor	49.991.600,00	48.395.500,00	96,81%
	☼ Pameran Dagang Internasional/Nasional	300.000.000,00	267.401.217,00	89,13%
G	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	322.387.120,00	317.422.120,00	98,46%
9	<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>	322.387.120,00	317.422.120,00	98,46%
	☼ Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	322.387.120,00	317.422.120,00	98,46%

Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dalam mengelola anggaran tidak hanya mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip tata laksana keuangan yang baik, tetapi juga keterbukaan dan akuntabilitas mereka kepada masyarakat. Dengan tetap mempertahankan transparansi dalam penggunaan dana publik dan terus meningkatkan efisiensi operasional, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dapat terus menjadi teladan dalam manajemen anggaran yang baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di masa mendatang.



### 3.8 Aspek Keuangan

Program dan kegiatan yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali didukung dengan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.17**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali**

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Peresentase (%)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>22.757.083.246</b>	<b>20.972.002.502</b>	<b>92,16%</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	14.709.918.886	13.778.273.830	93,67%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.331.164.360	6.478.728.672	88,37%
5.1.05	Belanja Hibah	716.000.000	715.000.000	99,86%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>178.526.500</b>	<b>151.149.000</b>	<b>84,66%</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.526.500	151.149.000	84,66%
	<b>TOTAL</b>	<b>22.935.609.746</b>	<b>21.123.151.502</b>	<b>92,10%</b>

Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mencatat capaian realisasi keuangan yang cukup baik. Dengan pendekatan yang hati-hati dan transparan, Dinas perindustrian dan perdagangan provinsi bali berhasil mengalokasikan sumber daya secara efisien dalam pelaksanaan program/ kegiatan. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mengelola anggaran sebesar Rp.22.935.609.746 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.21.123.151.502 dengan realisasi fisik 100% dari target 100%.



# BAB IV

# PENUTUP





## BAB IV

### PENUTUP



Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun Pertama dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2024-2026, Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak, Hasil laporan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali tahun 2022 dapat disimpulkan dari analisis ke 3 (Tiga) sasaran yaitu :

- a. **Sasaran 1** : Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB, dengan indikator kinerja: Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan target 9% dengan realisasi 8,69%
- b. **Sasaran 2** : Meningkatnya sektor Perindustrian terhadap PDRB dengan indikator kinerja: Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB target sebesar 6,04% realisasi sebesar 6,24%,
- c. **Sasaran 3** : Meningkatnya daya saing ekonomi lokal dengan indikator kinerja: Persentase Produk yang terserap pasar target sebesar 30% dengan realisasi 30%,

Secara umum target dinas perindustrian dan perdagangan provinsi bali tercapai seluruhnya selain itu langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi



tantangan kedepan yang dihadapi dapat dirumuskan dalam rencana aksi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Fasilitas sarana dan prasarana, peningkatan jaringan bisnis dan pemasaran, kelembagaan, serta peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha,
2. Meningkatkan kolaborasi antar *stakeholder* yaitu Pemerintah, Swasta, Akademisi dan lain-lain,